



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI MALUKU UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI MALUKU UTARA**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Maluku Utara**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: panoramio.com, halut-news.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	26
Prioritas Bidang Kesehatan	28
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	31
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	34
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	35
PNPM Mandiri.....	36
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	38
Keuangan Daerah.....	41



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2010
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008 – 2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

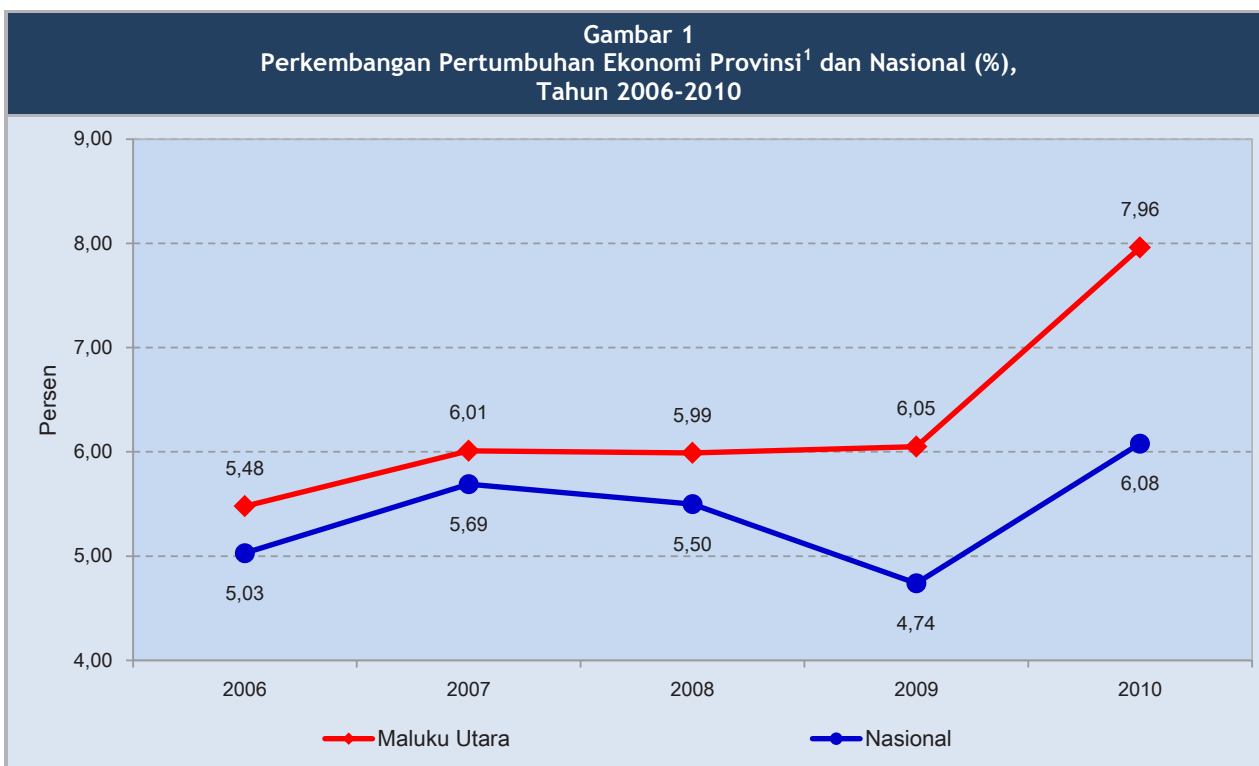


DAFTAR GAMBAR

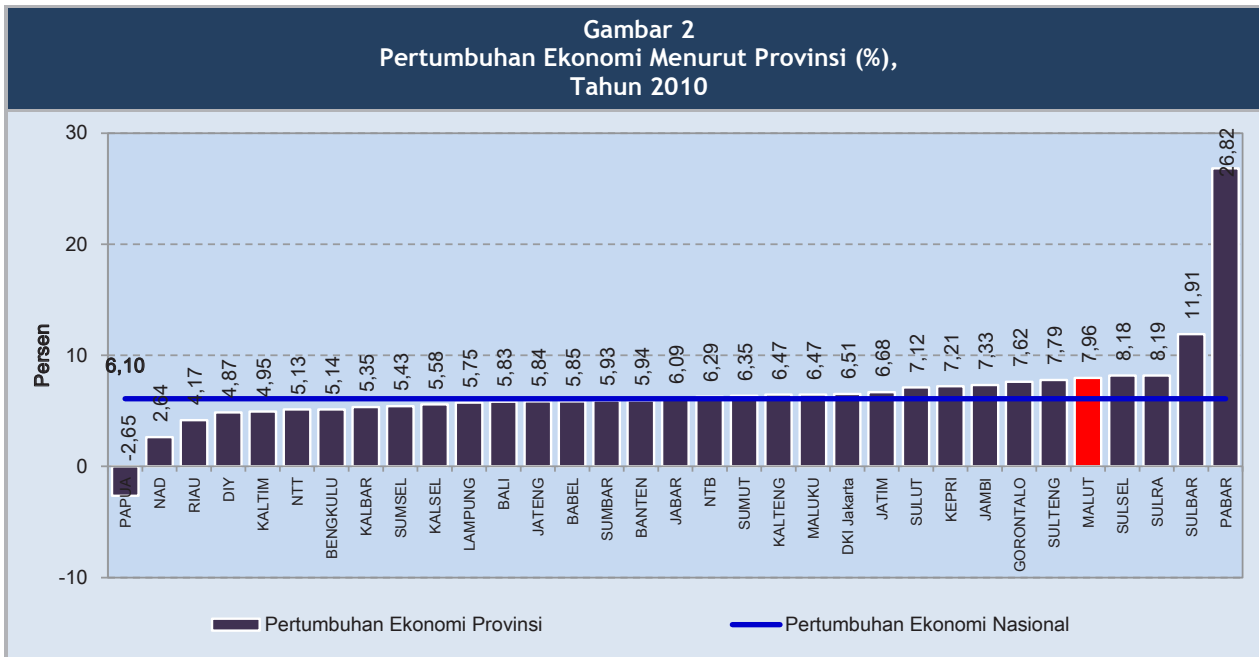
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Maluku Utara (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Maluku Utara, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Maluku Utara, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Maluku Utara (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Maluku Utara (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	1521,98	1750,97	1958,06	951,12	996,84	1052,46	9,30	4,81	5,58
Pertambangan Dan Penggalian	194,45	233,53	276,22	126,94	114,39	124,23	2,86	(9,88)	8,60
Industri Pengolahan	466,87	609,97	703,79	339,30	351,85	371,99	-8,66	3,70	5,72
Listrik. Gas & Air Bersih	24,19	27,89	30,89	12,89	13,16	14,19	2,10	2,12	7,78
Bangunan	89,11	127,75	159,18	47,17	50,80	54,30	15,88	7,70	6,88
Perdagangan. Hotel & Restoran	846,12	1072,93	1263,23	668,43	734,59	823,57	7,94	9,90	12,11
Pengangkutan & Komunikasi	323,10	375,11	422,68	209,21	228,83	246,60	12,70	9,38	7,76
Keuangan. Persewaan & Jasa Per.	131,36	173,31	202,57	92,47	101,67	109,31	10,48	9,96	7,51
Jasa - Jasa	259,18	316,29	369,51	203,24	218,07	239,64	4,69	7,30	9,89
Produk Domestik Regional Bruto	3.856,36	4.687,76	5.386,14	2.650,76	2.810,21	3.036,28	5,98	6,05	7,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010
(Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	233,63	228,56	231,3	228,7	238,79
Pertambangan Dan Penggalian	6,76	7,1	6,76	9,73	6,37
Industri Pengolahan	15,03	24,99	8,61	10,35	9,81
Listrik. Gas & Air Bersih	0,76	3,61	1,71	3,89	1,5
Bangunan	17,8	13,74	16,15	14,1	12,26
Perdagangan. Hotel & Restoran	44,58	60,38	39,91	49,09	43,78
Pengangkutan & Komunikasi	25,43	24,19	26,15	21,2	23,6
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	2,96	1,82	1,77	0,79	3,52
Jasa - Jasa	48	46	61,5	58,88	71,74
Jumlah	394,58	410,64	393,86	396,73	411,37

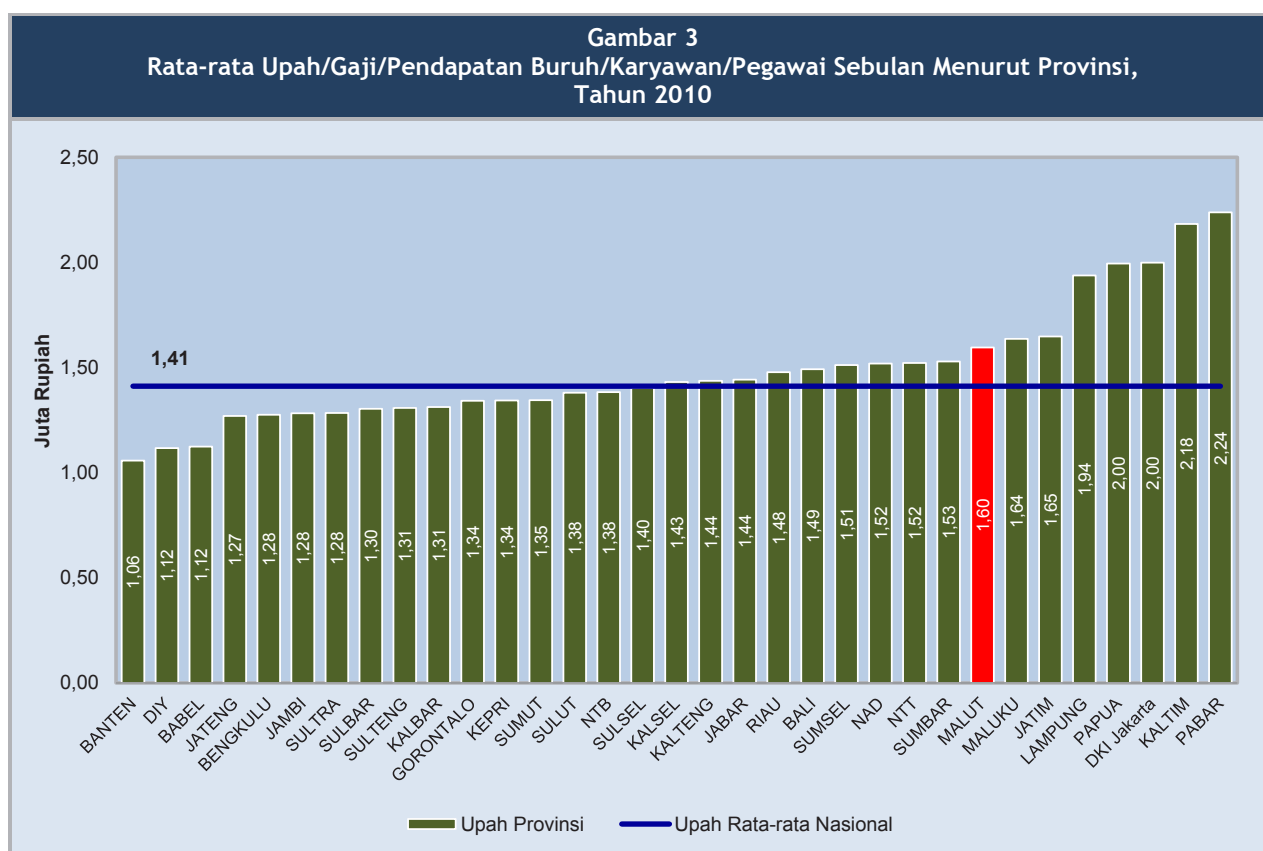
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2009-2010 (Persen)

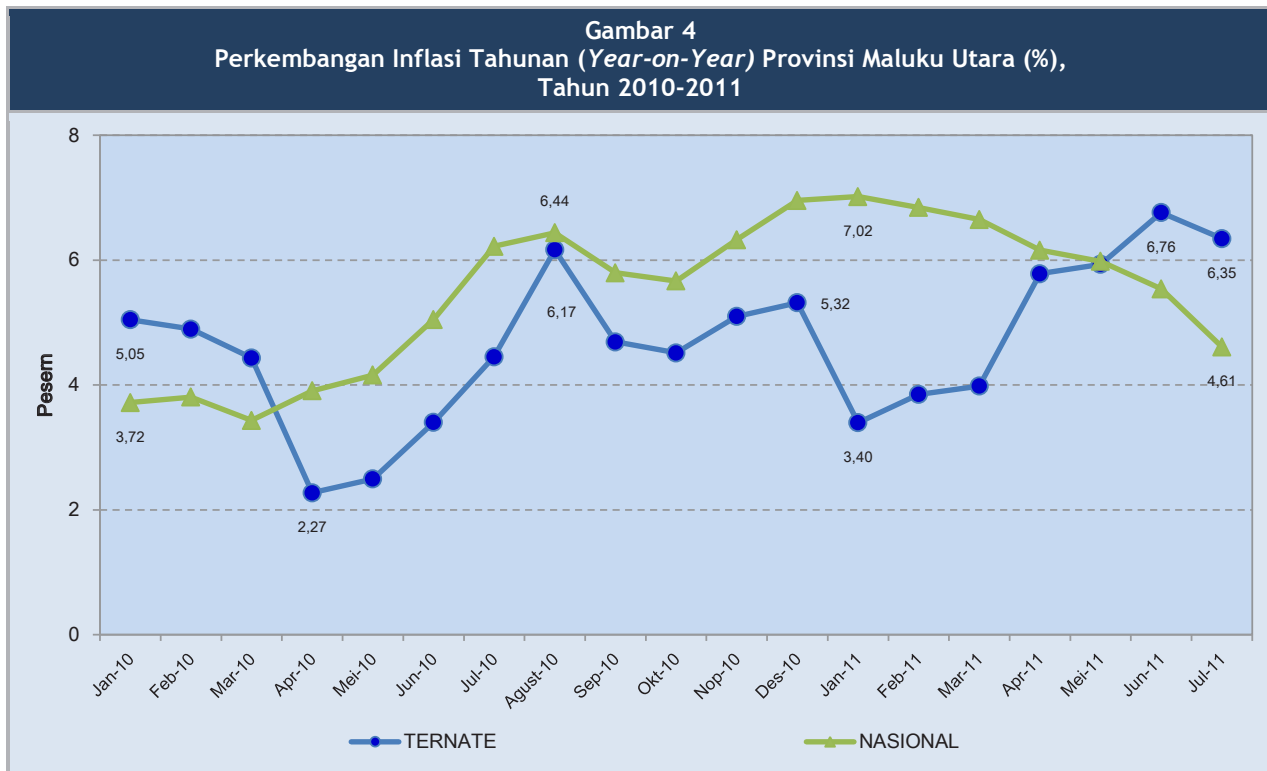
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	35,88	35,47	34,66	59,21	58,73	58,05
Pertambangan Dan Penggalian	4,79	4,07	4,09	1,71	1,72	1,55
Industri Pengolahan	12,80	12,52	12,25	3,81	2,19	2,38
Listrik, Gas & Air Bersih	0,49	0,47	0,47	0,19	0,43	0,36
Bangunan	1,78	1,81	1,79	4,51	4,10	2,98
Perdagangan, Hotel & Restoran	25,22	26,14	27,12	11,30	10,13	10,64
Pengangkutan & Komunikasi	7,89	8,14	8,12	6,44	6,64	5,74
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,49	3,62	3,60	0,75	0,45	0,86
Jasa - Jasa	7,67	7,76	7,89	12,07	15,61	17,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

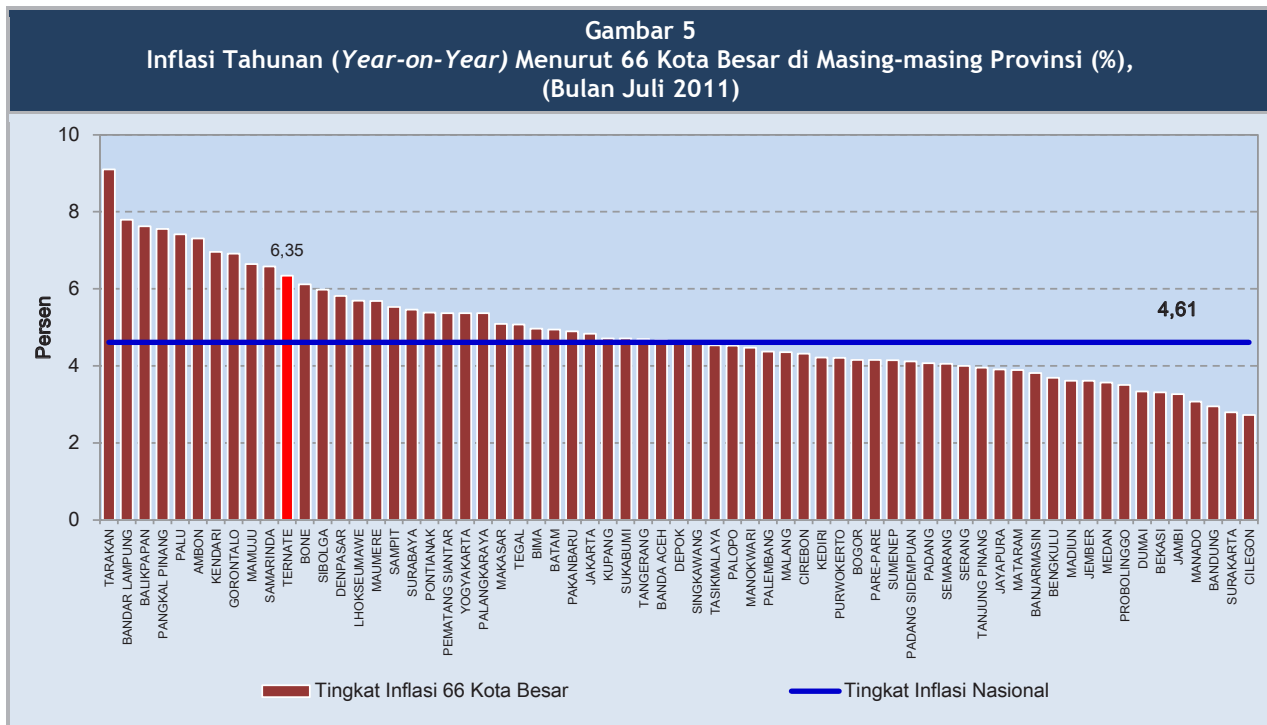


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

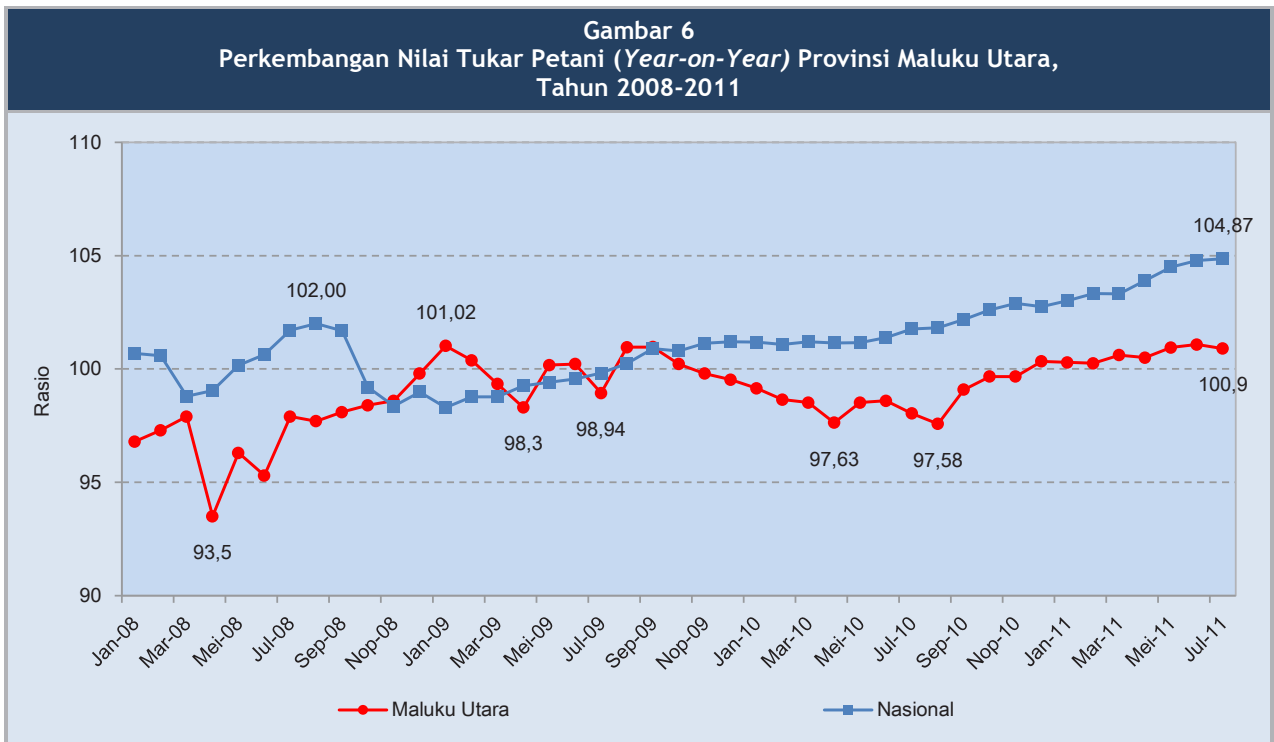


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

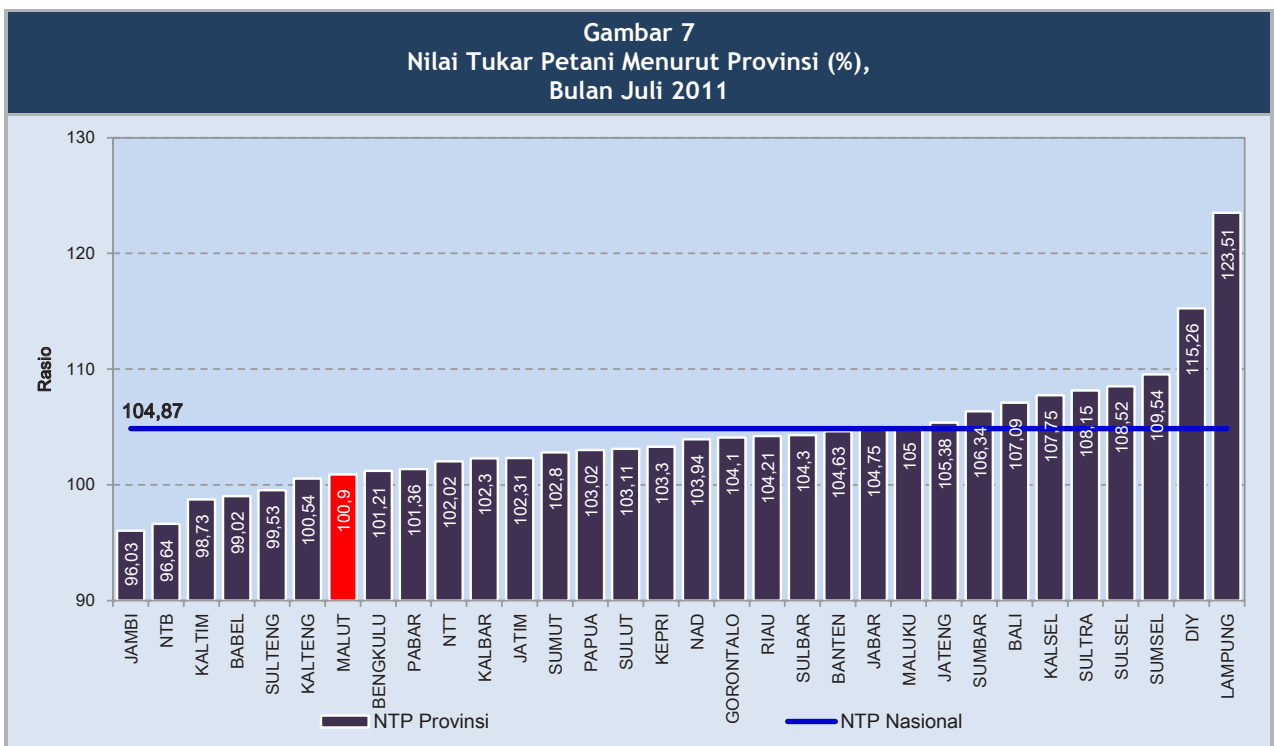


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

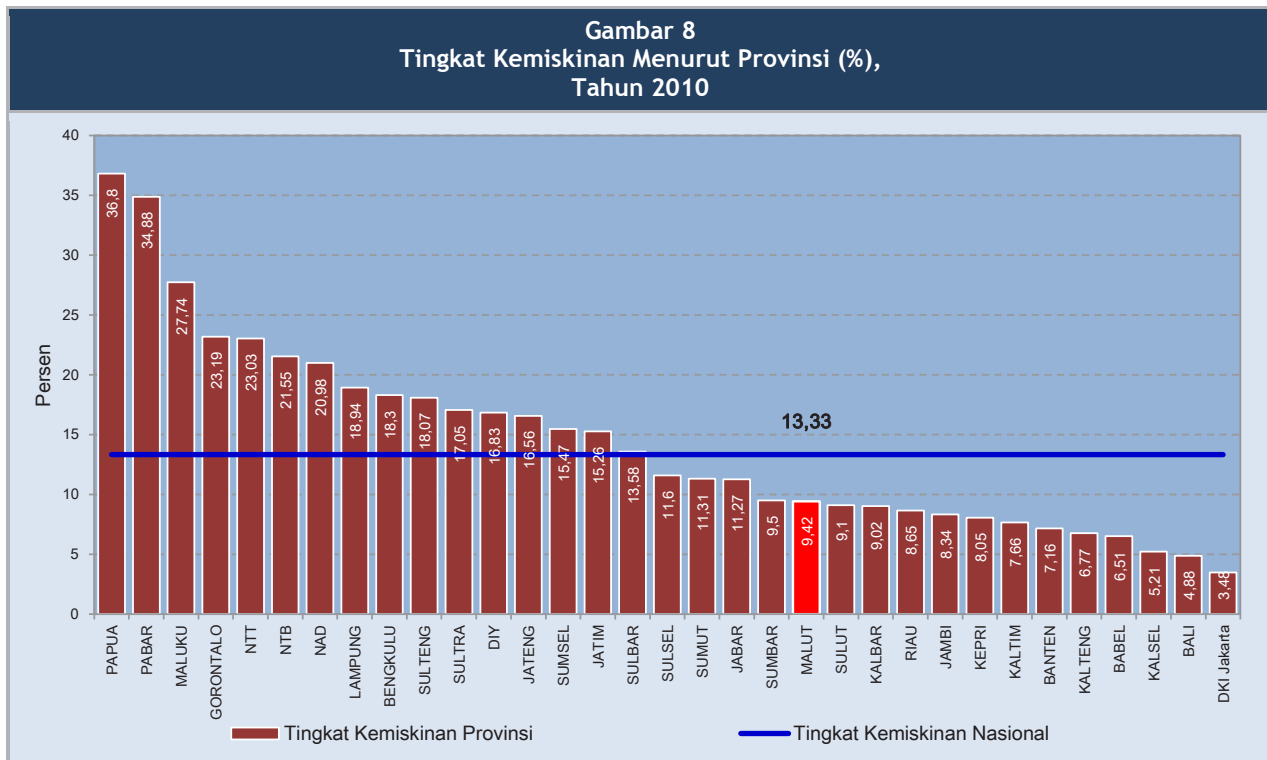


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

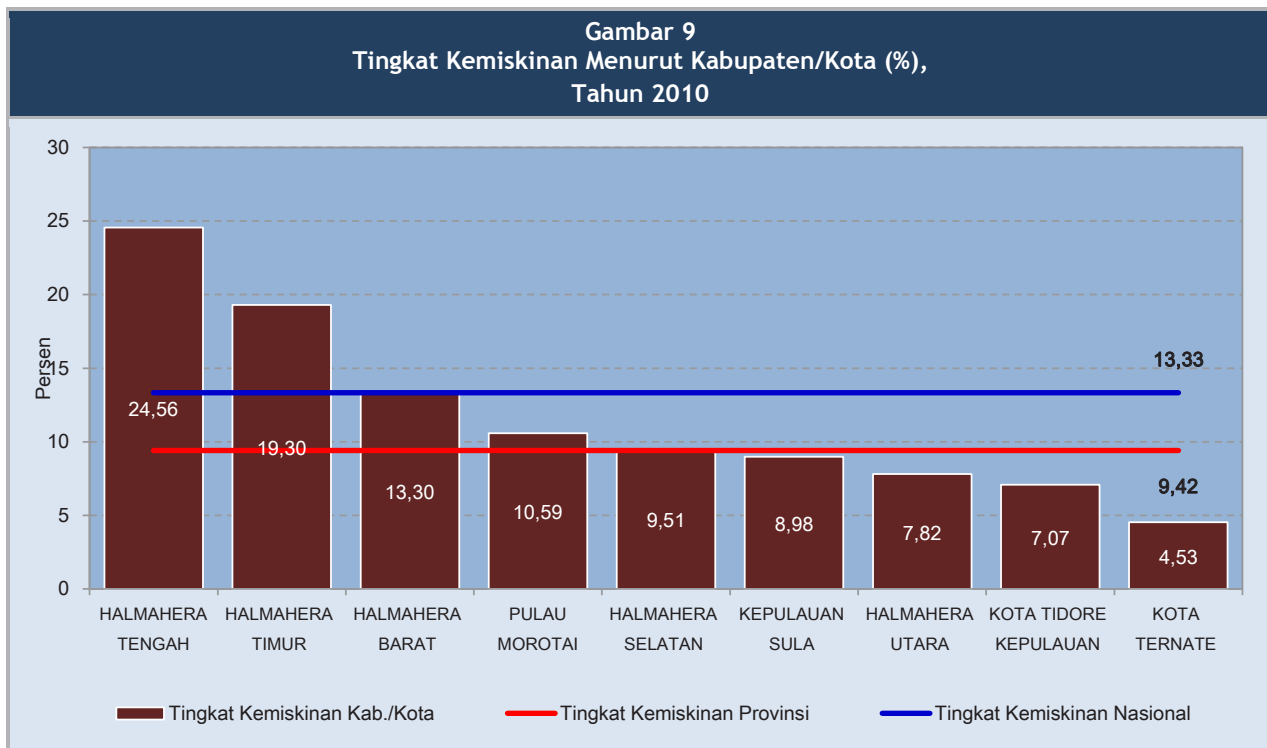


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

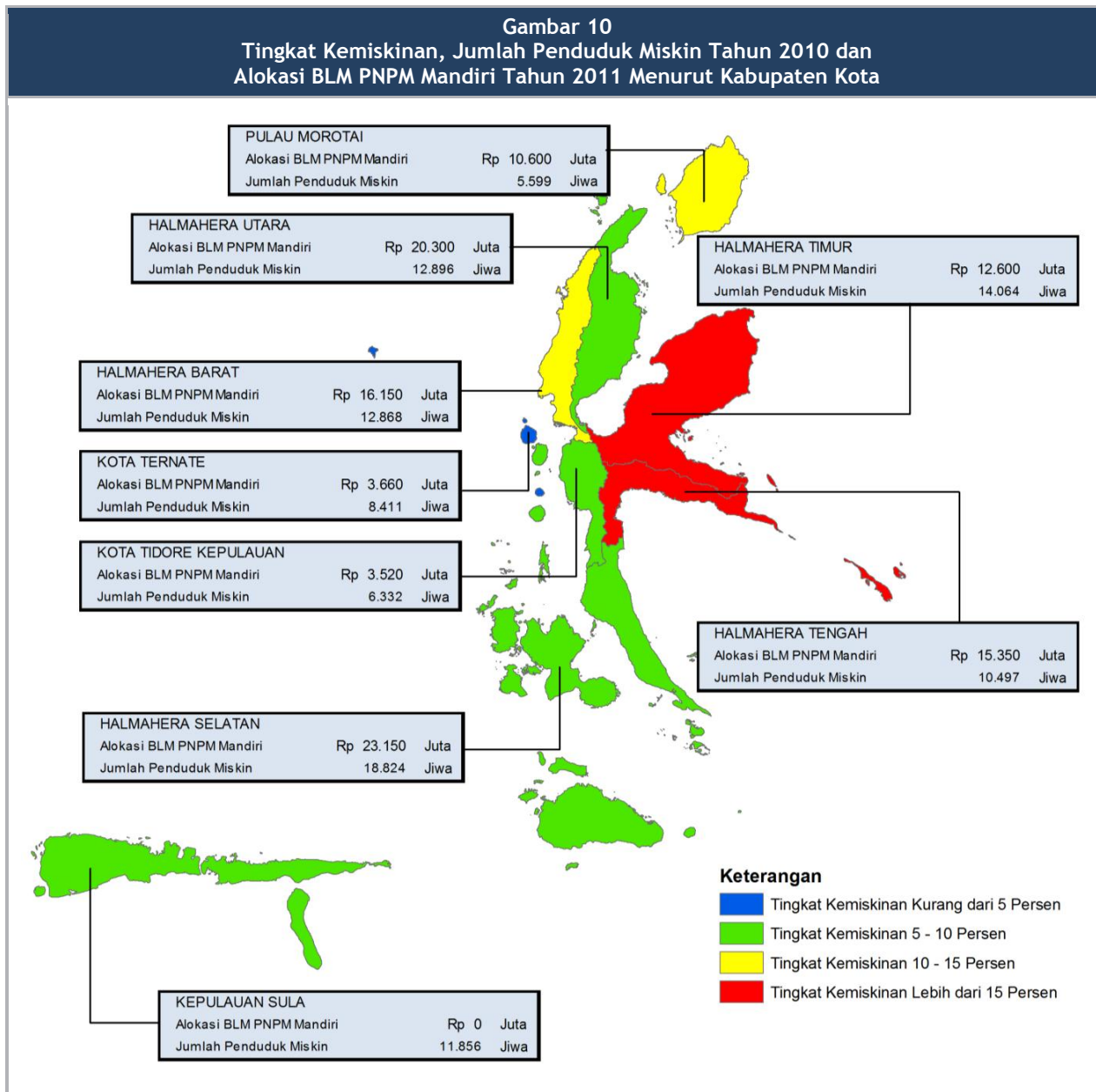
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
HALMAHERA BARAT	193 436	207 427	14,34	13,30	13 810	12 868
HALMAHERA TENGAH	255 844	274 349	26,64	24,56	9 123	10 497
KEPULAUAN SULA	198 491	212 848	11,51	8,98	14 737	11 856
HALMAHERA SELATAN	177 674	190 525	10,97	9,51	20 761	18 824
HALMAHERA UTARA	151 693	162 665	7,93	7,82	15 195	12 896
HALMAHERA TIMUR	282 667	303 112	19,55	19,30	13 476	14 064
PULAU MOROTAI		166 505		10,59		5 599
KOTA TERNATE	313 322	335 985	4,22	4,53	7 168	8 411
KOTA TIDORE KEPULAUAN	250 690	268 822	6,01	7,07	4 863	6 332
MALUKU UTARA	201 500	212 982	10,36	9,42	99 133	101 348
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

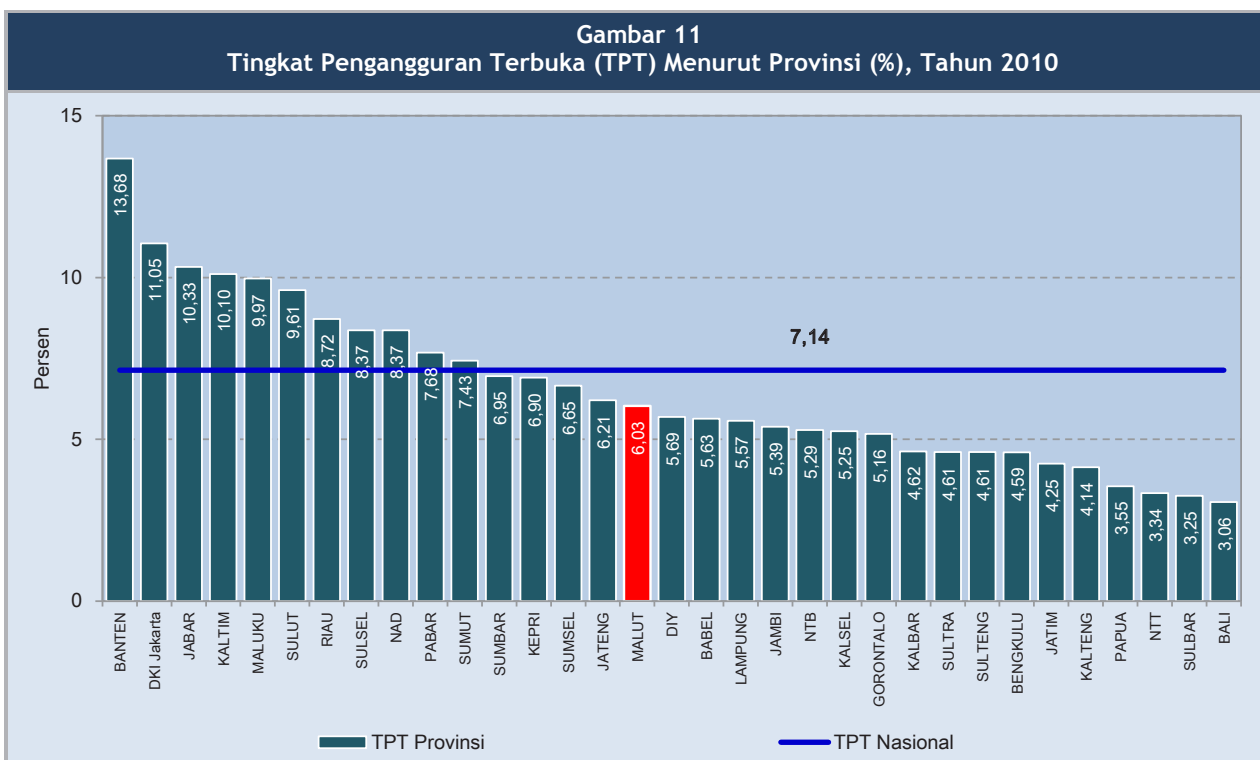
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

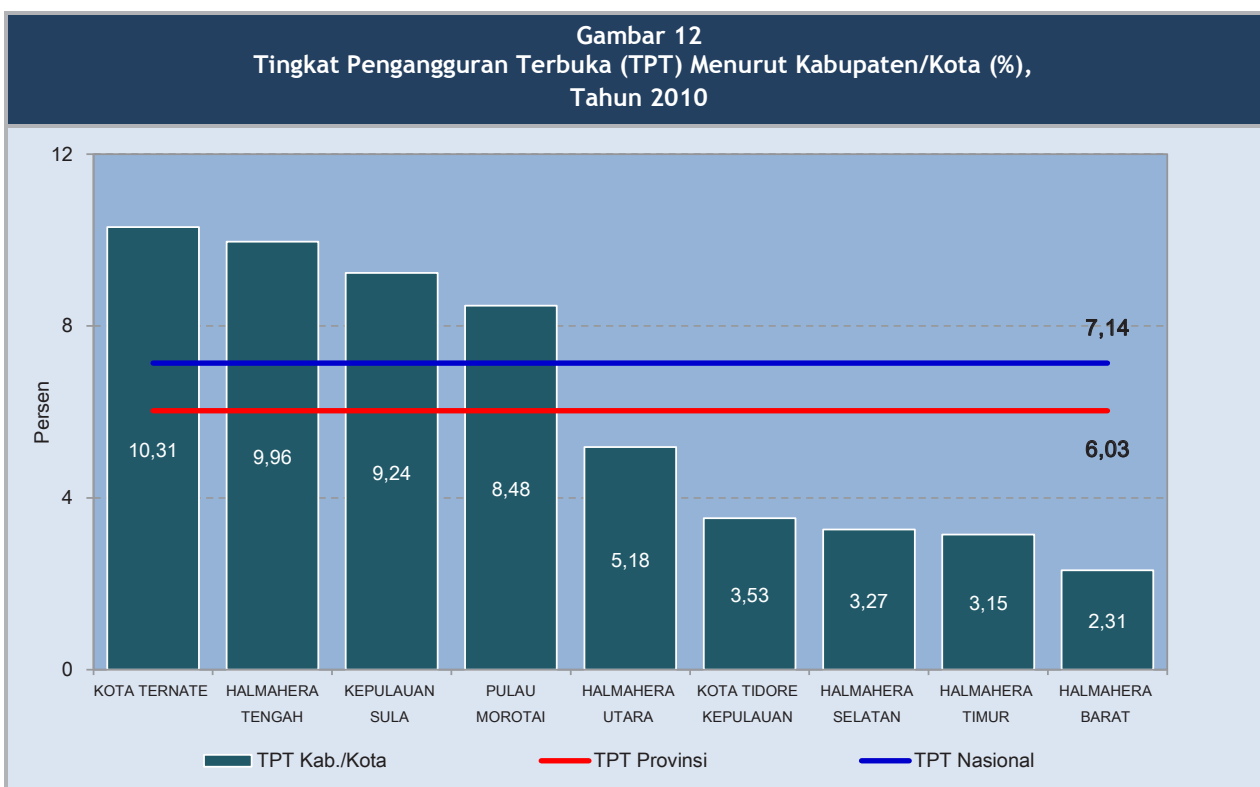


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

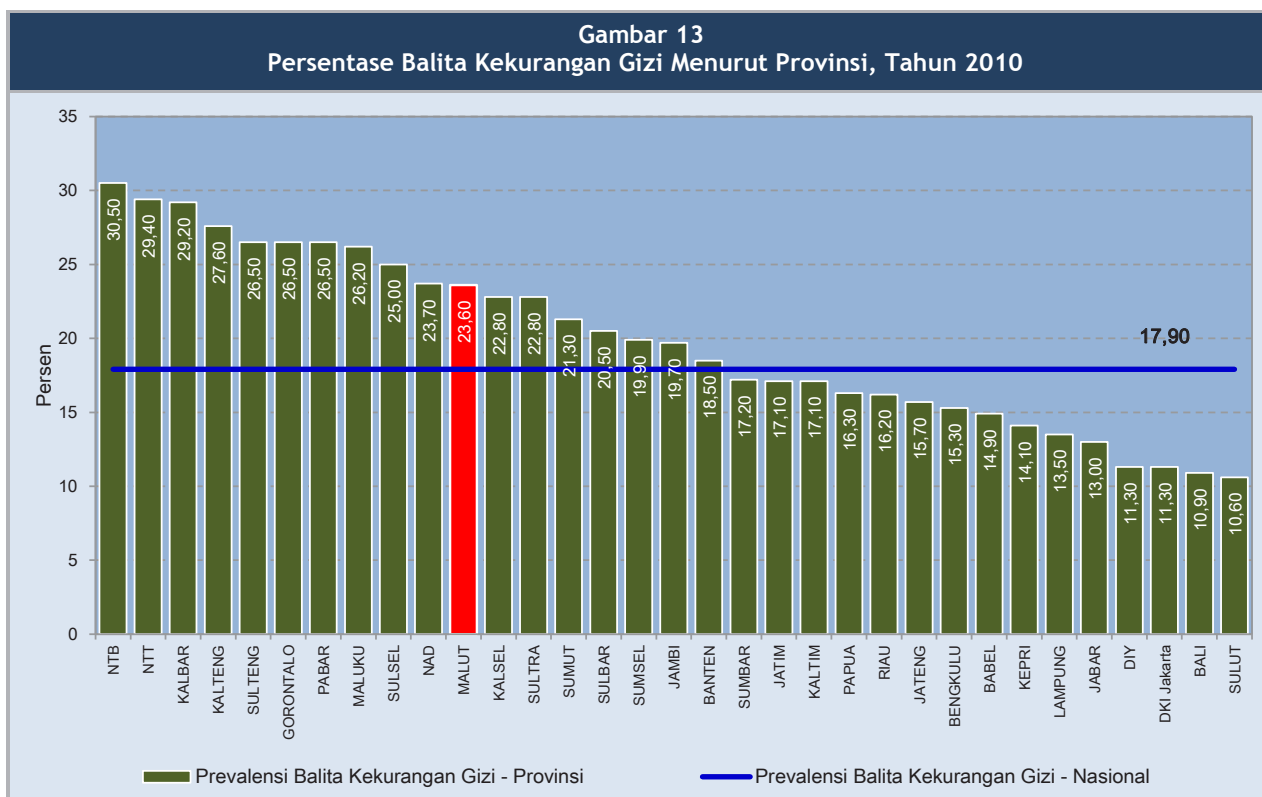
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
HALMAHERA BARAT	71,98	69,78	2,90	2,37	44,52	35,22	81,71	75,87
HALMAHERA TENGAH	61,84	70,47	6,39	6,57	33,44	41,32	72,37	68,79
KEPULAUAN SULA	57,92	60,71	4,07	4,78	33,51	33,71	72,27	63,93
HALMAHERA SELATAN	66,64	70,25	6,48	8,70	47,87	44,17	84,10	80,50
HALMAHERA UTARA	67,88	60,44	4,17	6,43	41,62	47,28	77,56	73,77
HALMAHERA TIMUR	69,13	66,66	2,27	1,44	17,03	31,24	83,17	79,36
PULAU MOROTAI		65,11		4,94		55,06		75,08
KOTA TERNATE	61,64	63,78	2,44	2,44	23,47	24,32	42,02	41,14
KOTA TIDORE KEPULAUAN	56,23	63,19	3,85	6,86	36,51	50,68	72,63	70,61
NMALUKU UTARA	64,19	65,11	4,02	5,13	36,26	38,87	71,54	68,28
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

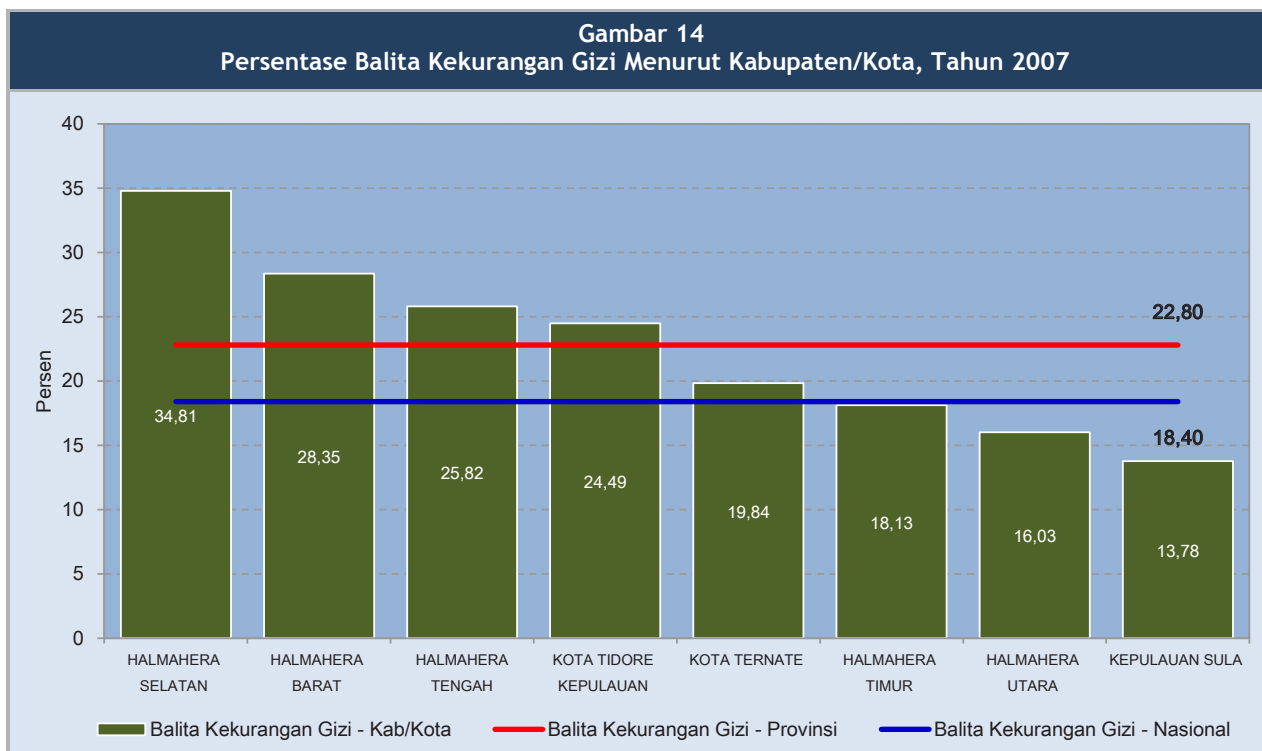
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

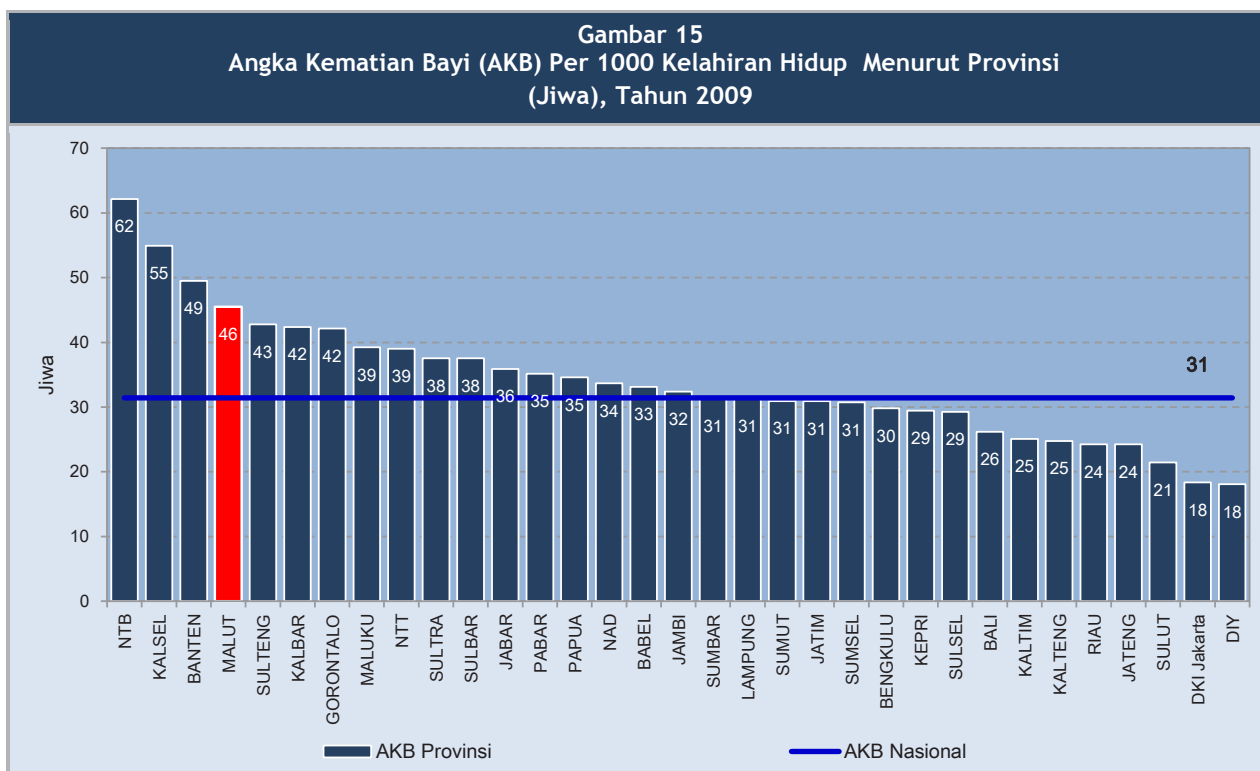


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

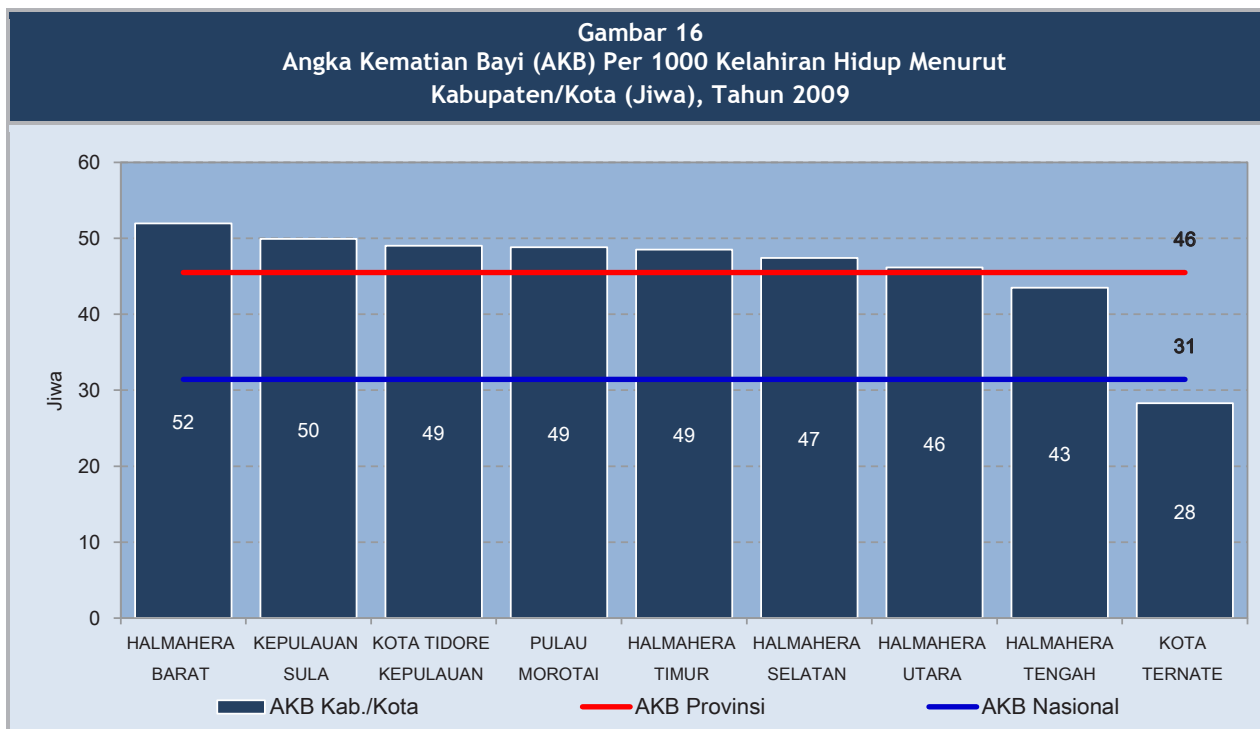


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

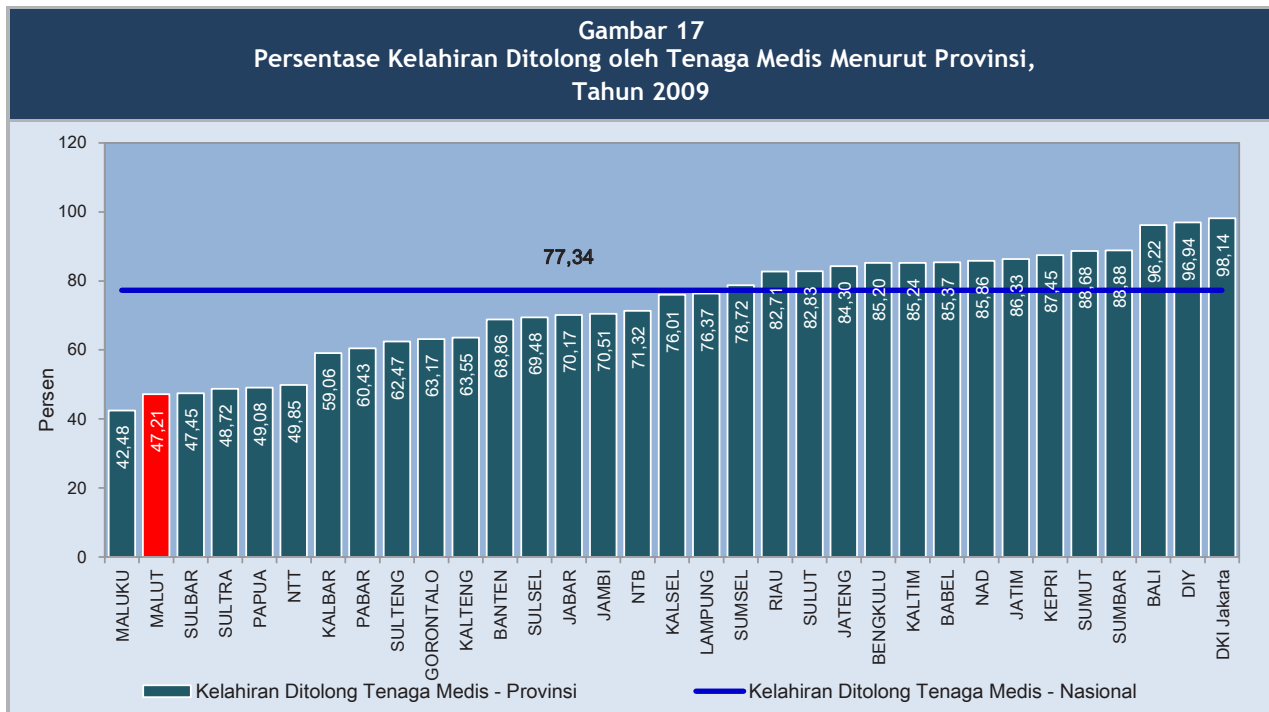


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

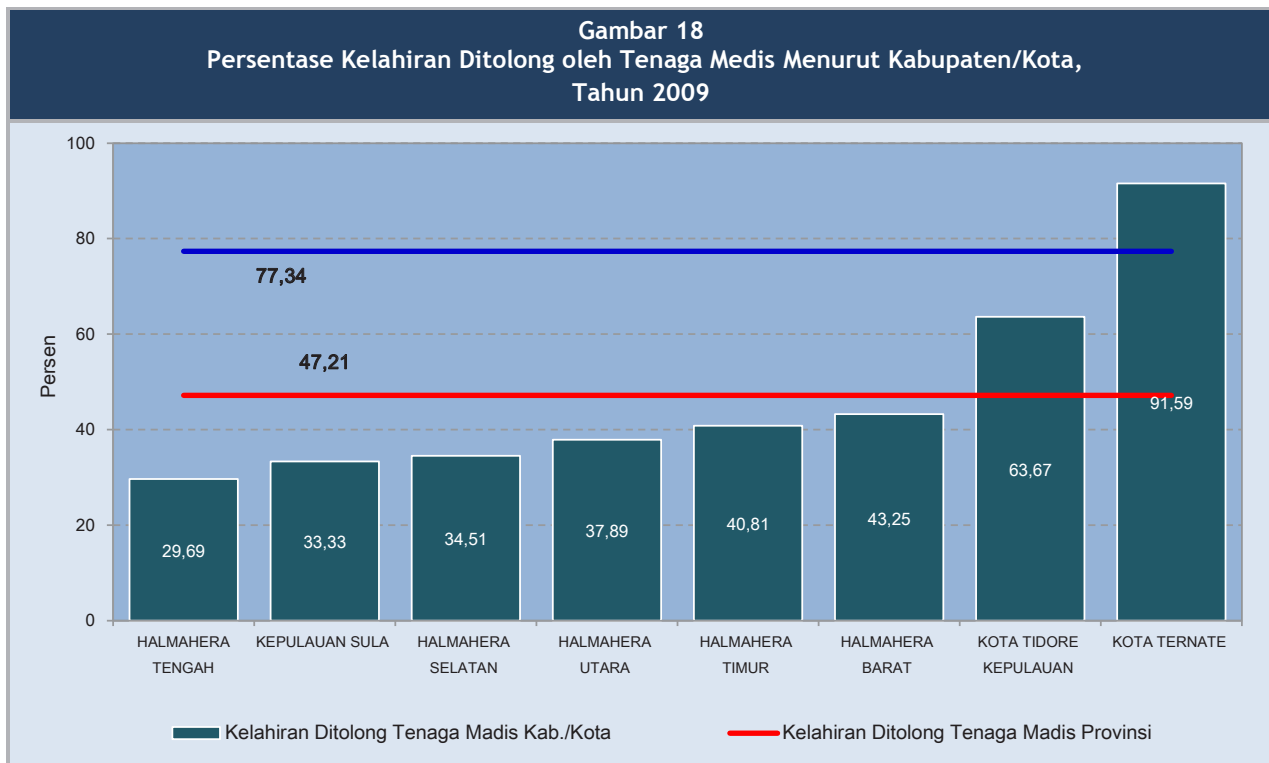


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

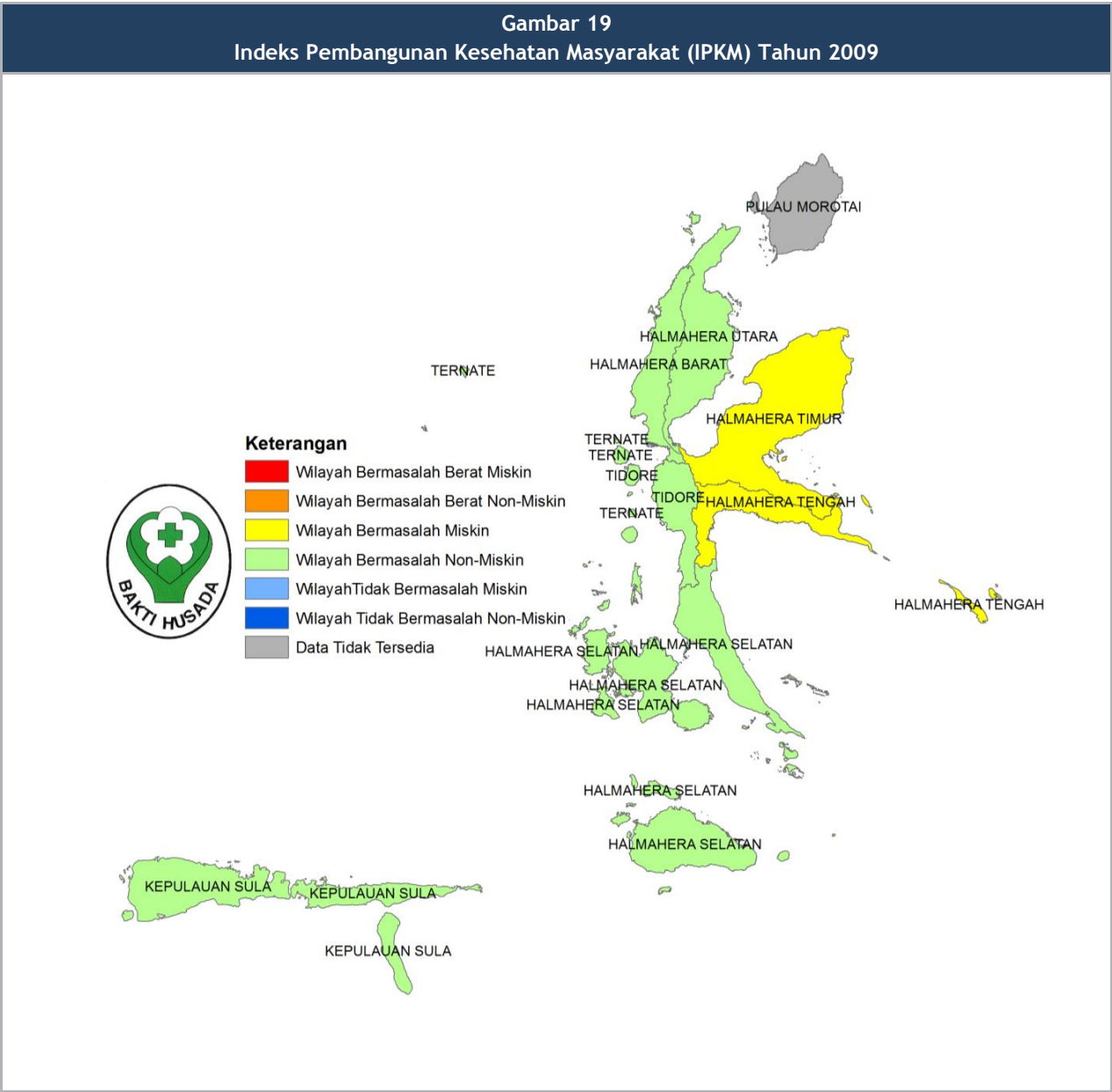
BIDANG KESEHATAN

Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
HALMAHERA BARAT	34,96	28,81	5,80	78,90
HALMAHERA TENGAH	39,53	28,64	6,32	75,30
KEPULAUAN SULA	18,91	15,32	6,77	93,19
HALMAHERA SELATAN	31,44	25,73	6,50	82,64
HALMAHERA UTARA	30,48	24,88	6,94	87,21
HALMAHERA TIMUR	18,51	13,73	5,50	88,01
KOTA TERNATE	28,99	18,54	4,51	85,04
KOTA TIDORE KEPULAUAN	16,63	15,05	5,21	72,86
MALUKU UTARA	27,61	21,55	6,10	83,97
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

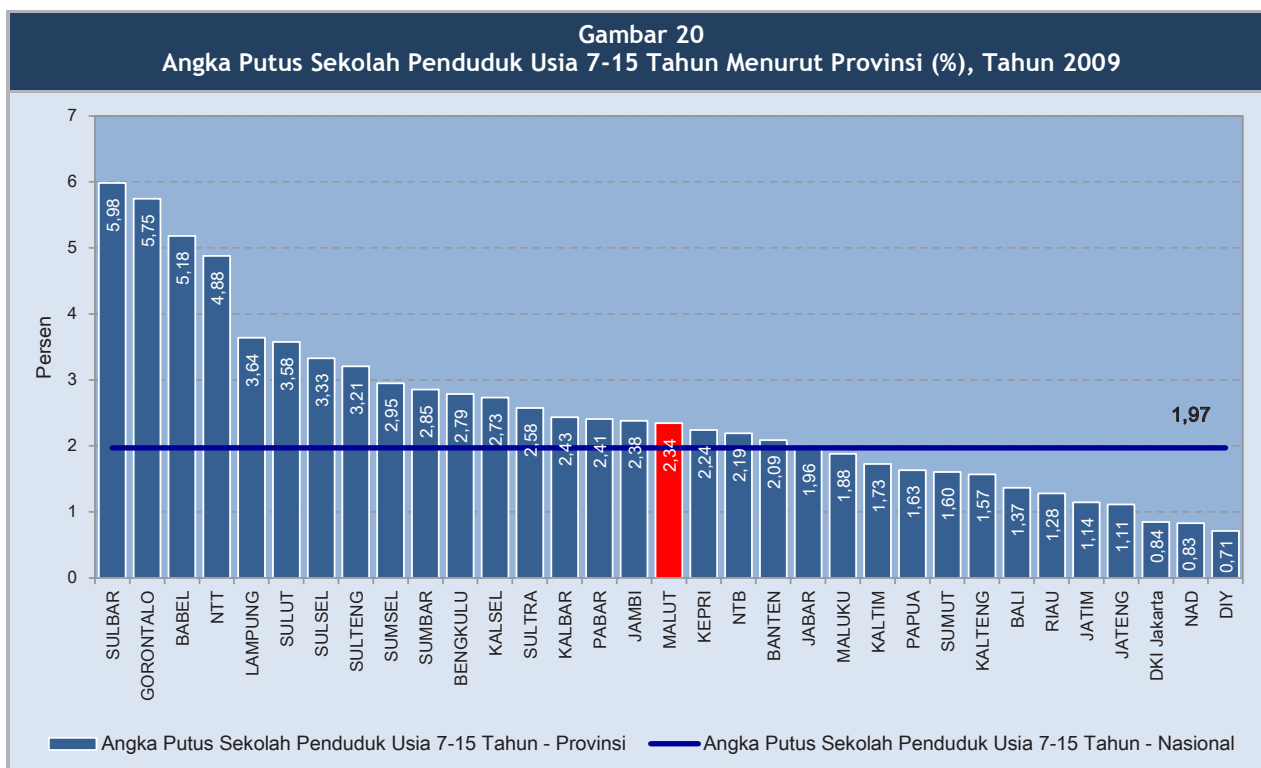
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
HALMAHERA TENGAH	KaC	361	0,43	Kabupaten Bermasalah Miskin
HALMAHERA TIMUR	KaC	339	0,44	Kabupaten Bermasalah Miskin
HALMAHERA BARAT	KaD	283	0,47	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
KEPULAUAN SULA	KaD	291	0,47	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
HALMAHERA SELATAN	KaD	375	0,41	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
HALMAHERA UTARA	KaD	341	0,44	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
TERNATE	KoD	109	0,59	Kota Bermasalah Non Miskin
TIDORE KEPULAUAN	KoD	84	0,60	Kota Bermasalah Non Miskin

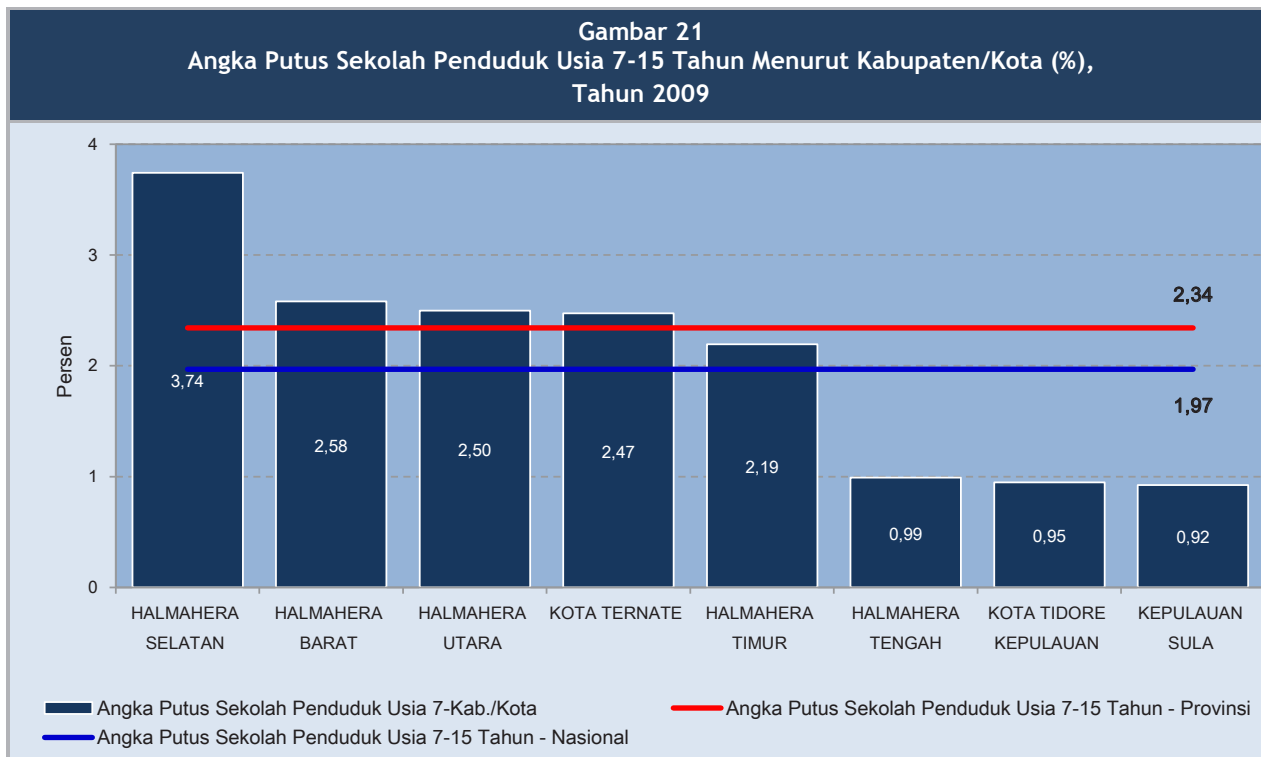
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



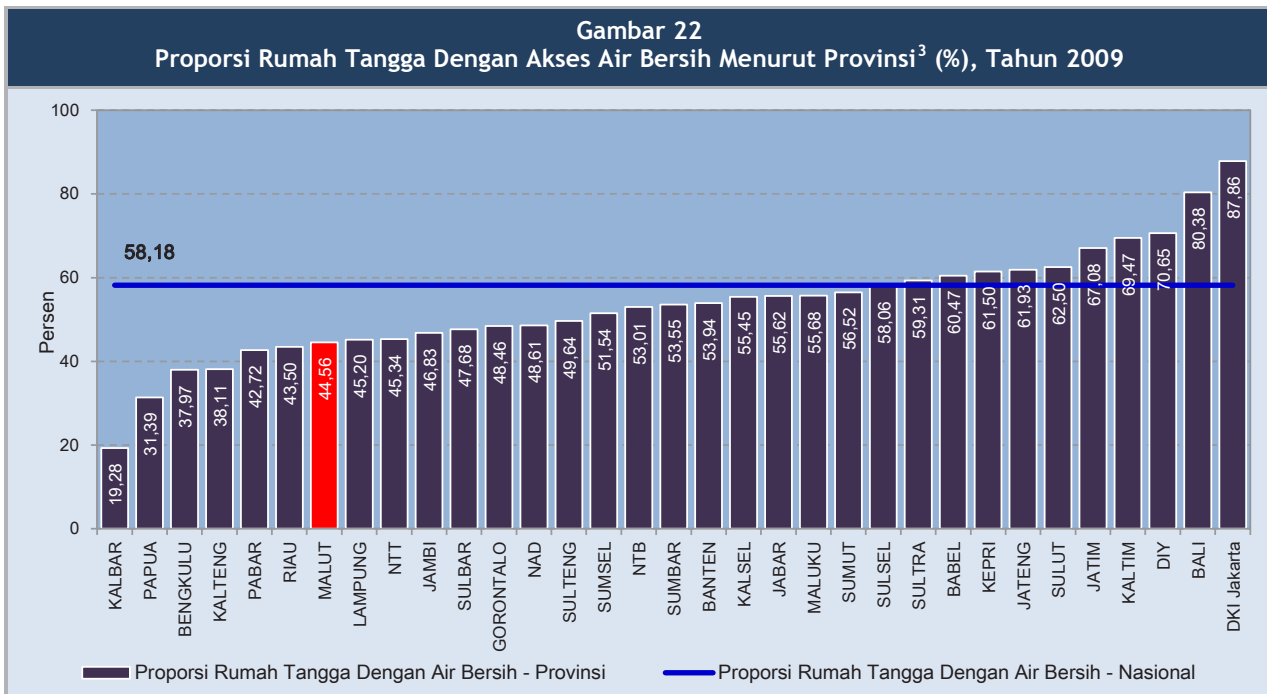
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

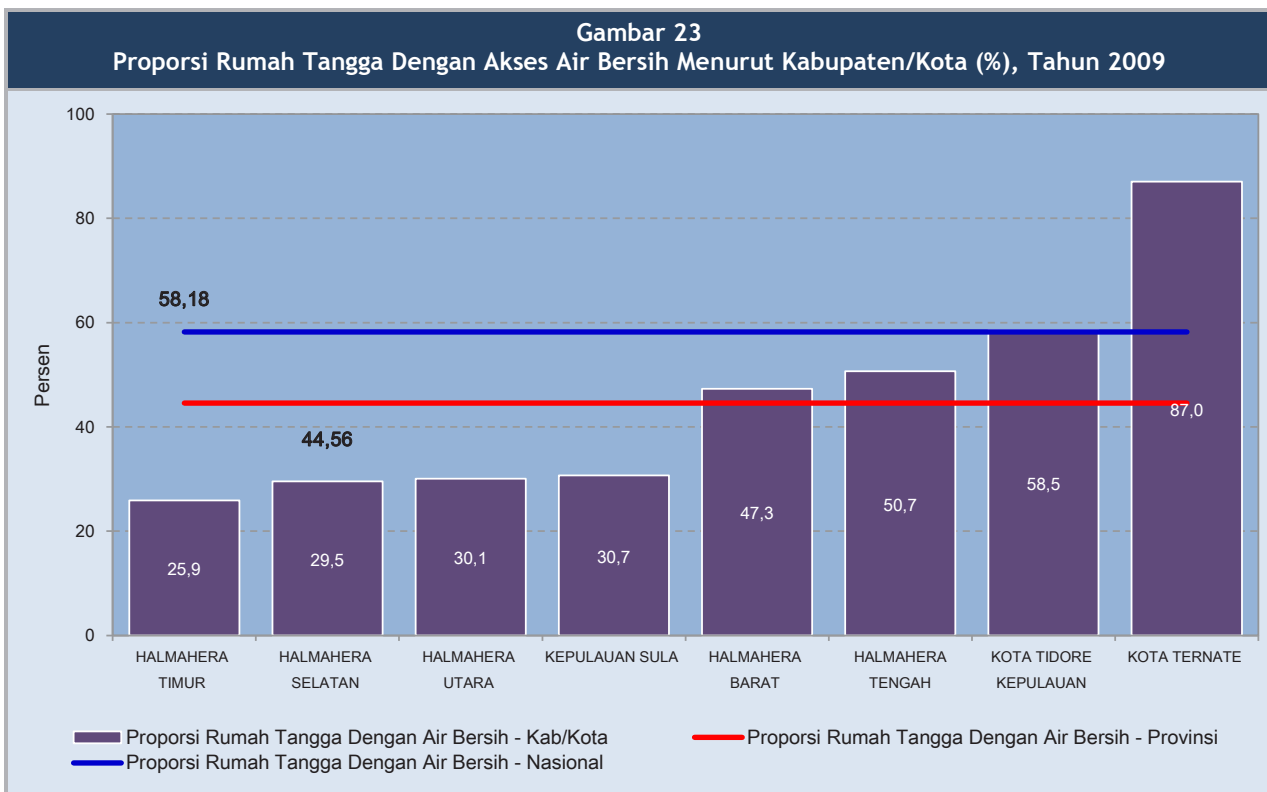
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
HALMAHERA BARAT	125,72	95,45	83,00	70,24	86,05	59,43
HALMAHERA TENGAH	118,20	94,24	81,36	69,79	103,20	70,58
KEPULAUAN SULA	120,52	95,43	73,24	62,46	67,39	51,40
HALMAHERA SELATAN	107,54	93,24	77,81	62,44	53,25	37,21
HALMAHERA UTARA	117,40	95,88	76,37	64,43	61,88	41,10
HALMAHERA TIMUR	107,87	92,11	80,56	59,79	55,67	44,27
KOTA TERNATE	108,54	89,68	86,54	64,69	97,97	68,63
KOTA TIDORE KEPULAUAN	106,95	88,05	113,21	78,62	82,53	64,19
MALUKU UTARA	113,65	93,39	81,75	65,49	72,73	51,74
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



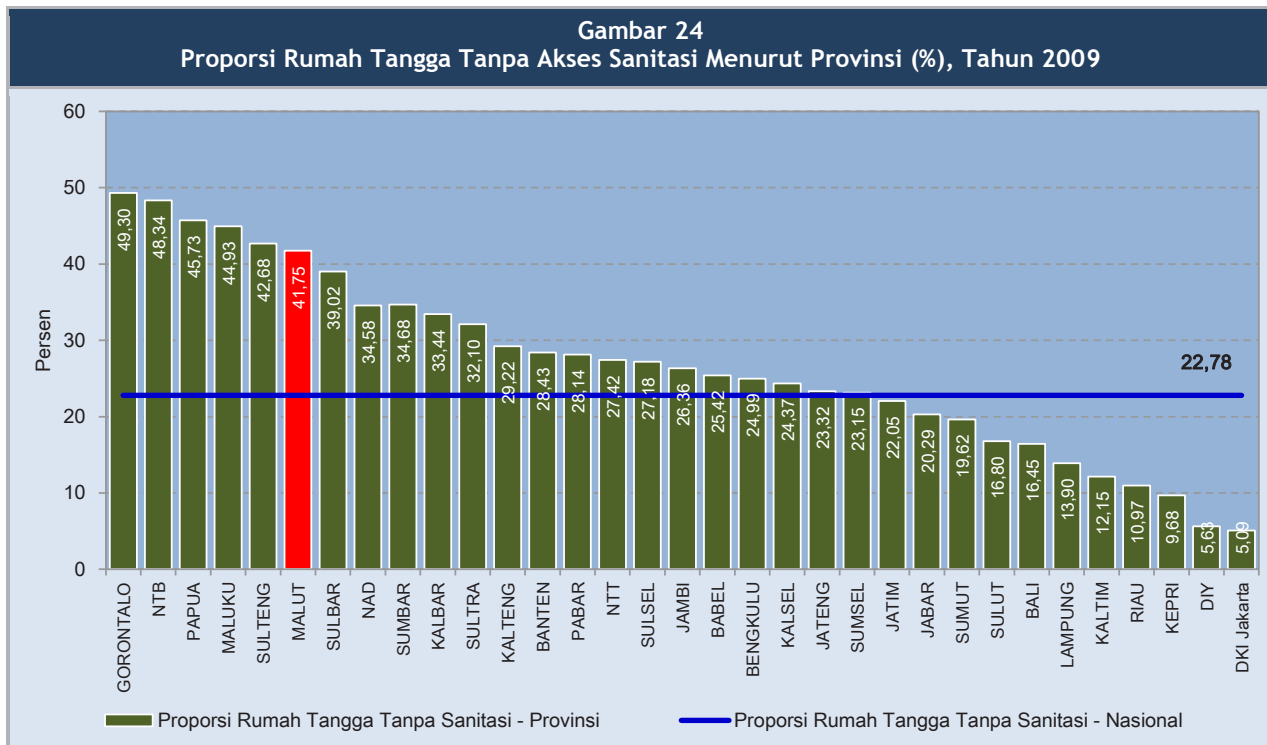
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



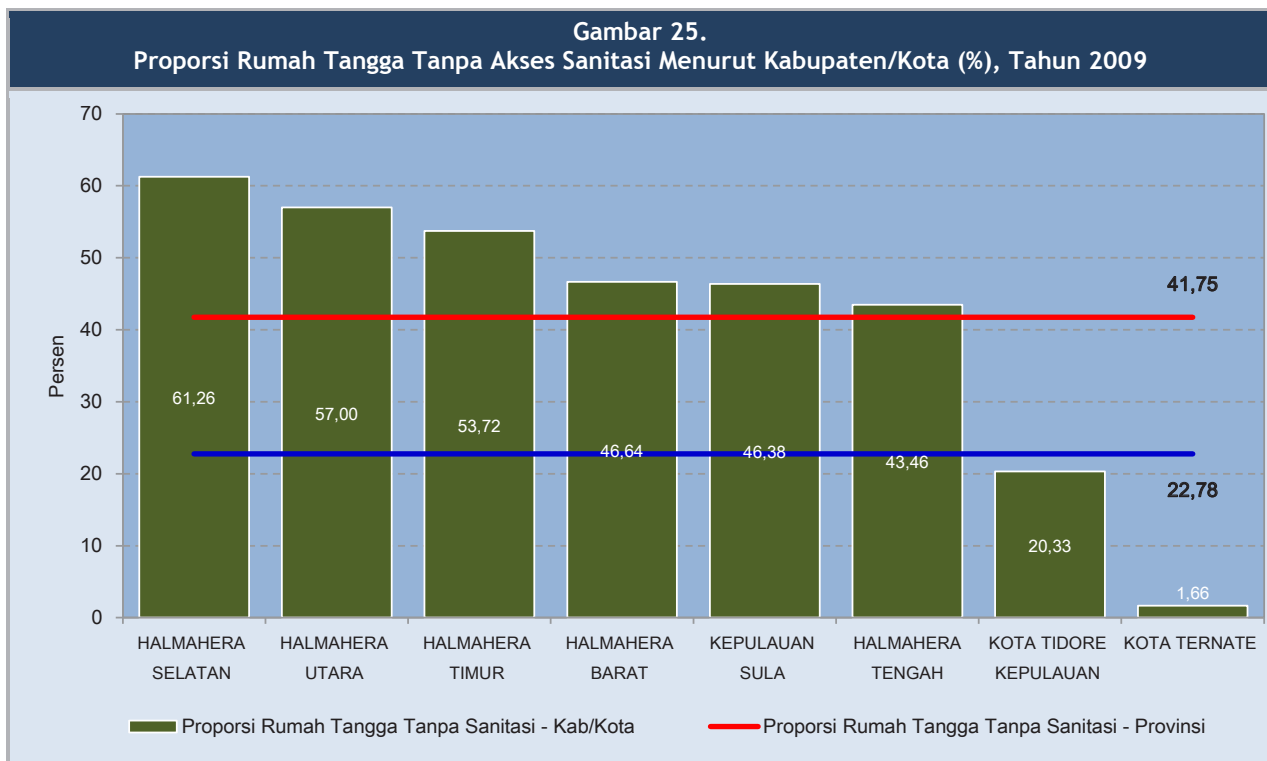
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

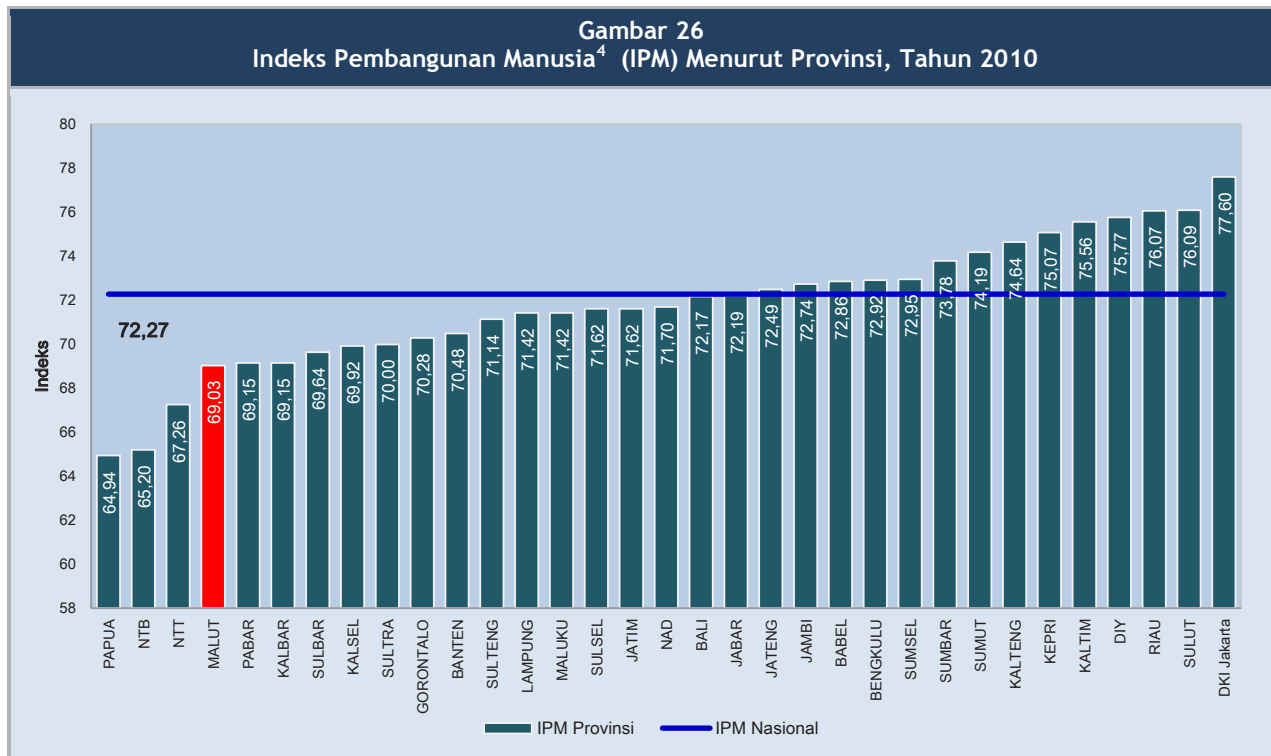


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

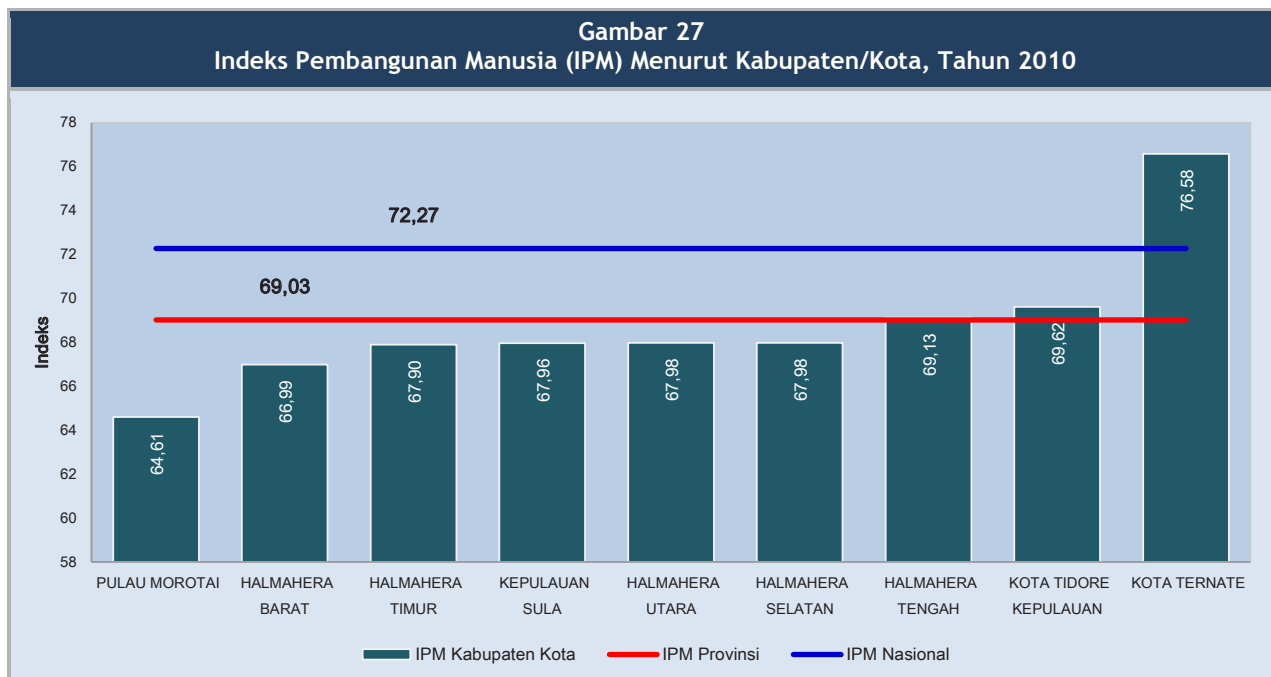


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

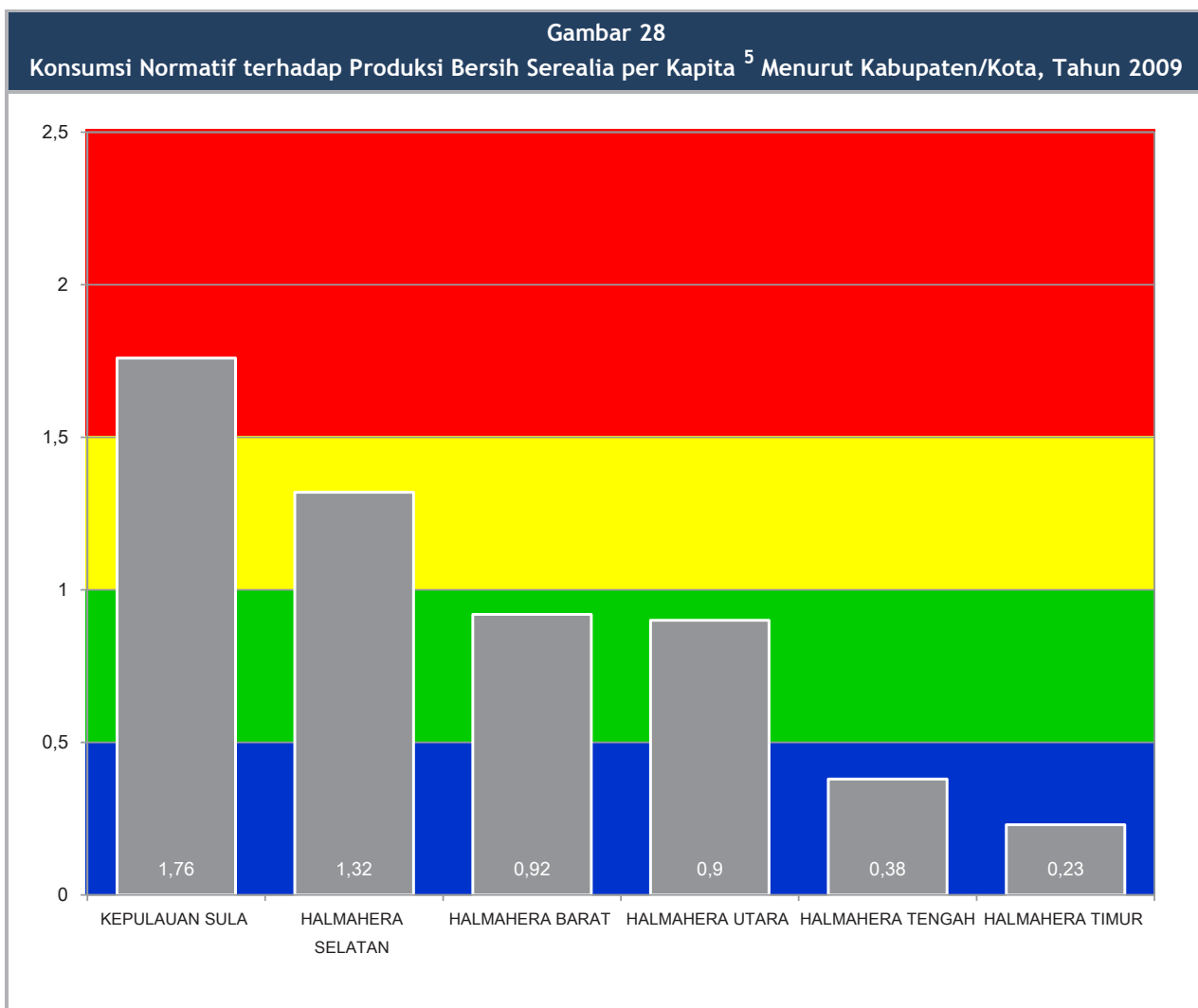
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		
HALMAHERA BARAT	64,16	64,38	95,70	95,71	7,75	7,84	591,97	594,09	66,63	66,99
HALMAHERA TENGAH	66,18	66,58	96,75	96,79	8,02	8,24	598,19	599,03	68,67	69,13
KEPULAUAN SULA	64,65	65,00	97,37	97,38	7,72	7,99	595,18	596,01	67,50	67,96
HALMAHERA SELATAN	65,25	65,47	95,82	95,83	7,44	7,48	599,60	602,30	67,62	67,98
HALMAHERA UTARA	65,55	65,87	95,91	95,98	7,33	7,38	597,63	599,81	67,57	67,98
HALMAHERA TIMUR	64,99	65,32	95,44	95,72	7,81	7,83	597,39	599,26	67,50	67,90
PULAU MOROTAI	64,91	65,23	93,10	93,89	6,02	6,15	578,48	578,62	64,15	64,61
KOTA TERNATE	70,07	70,47	98,90	98,95	10,70	10,82	635,01	636,83	76,13	76,58
KOTA TIDORE KEPULAUAN	64,87	65,06	97,61	97,62	8,55	8,75	608,00	609,10	69,28	69,62
MALUKU UTARA	65,70	66,01	95,74	96,08	8,61	8,63	598,45	600,20	68,63	69,03
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Maluku Utara Dalam Angka (BPS), 2010.

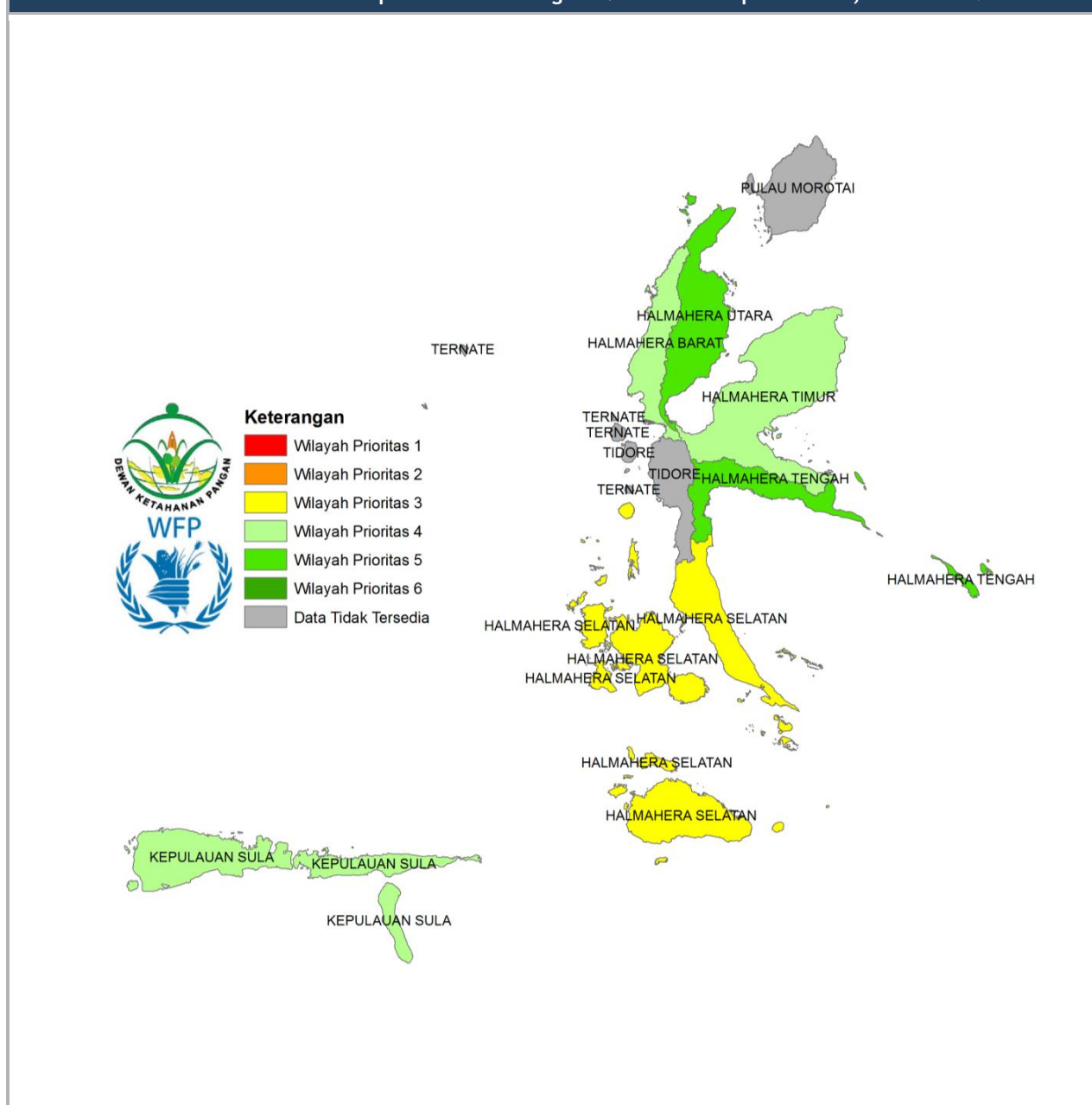
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)			
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)		2009	2008	2009
HALMAHERA BARAT	327	0.92	14.34	30.68	7.86	5.19	64.16	33.3	33.57	52.70	2009	33.57	52.70	662.9
HALMAHERA TENGAH	796	0.38	26.64	31.38	8.82	10.00	66.18	33.7	0.00	49.33	2009	0.00	49.33	146.0
KEPULAUAN SULA	171	1.76	11.51	48.78	14.96	7.98	64.65	18.4	40.16	69.29	2009	40.16	69.29	516.9
HALMAHERA SELATAN	227	1.32	10.97	52.41	57.65	9.00	65.25	43.3	52.55	70.46	2009	52.55	70.46	1280.9
HALMAHERA UTARA	335	0.9	7.93	40.03	11.49	6.06	65.55	21.1	33.72	69.92	2009	33.72	69.92	491.6
HALMAHERA TIMUR	1297	0.23	19.55	6.19	15.07	6.32	64.99	19.9	26.03	74.11	2009	26.03	74.11	387.1
PULAU MOROTAI***							64.91				2009			52.1
KOTA TERNATE**			4.22	6.04	1.35	2.68	70.07	23.6	2.70	13.00	2009	2.70	13.00	106.7
KOTA TIDORE KEPULAUAN**			6.01	20.80	2.78	4.99	64.87	29.9	16.67	41.48	2009	16.67	41.48	345.0

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

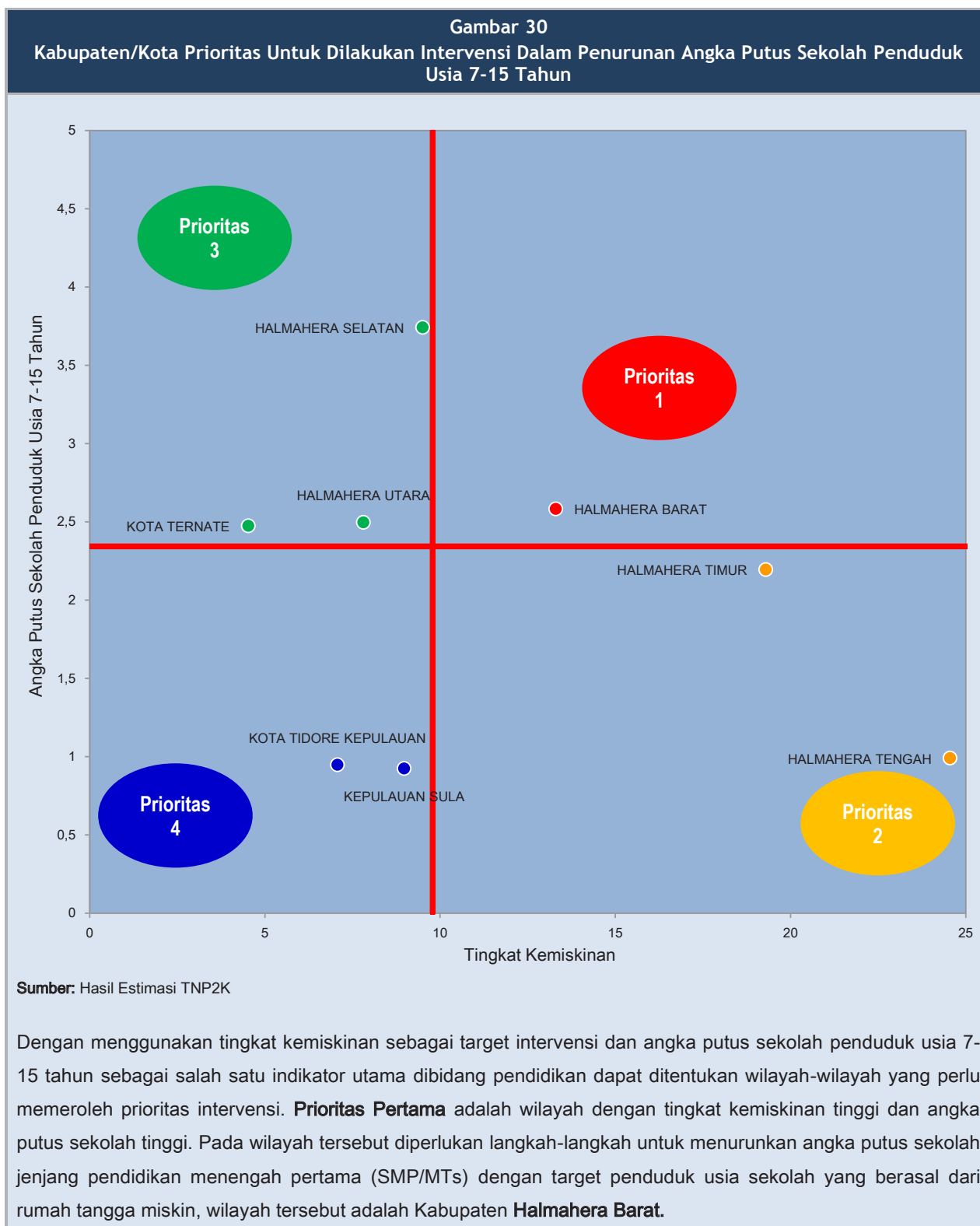
Keterangan:

*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

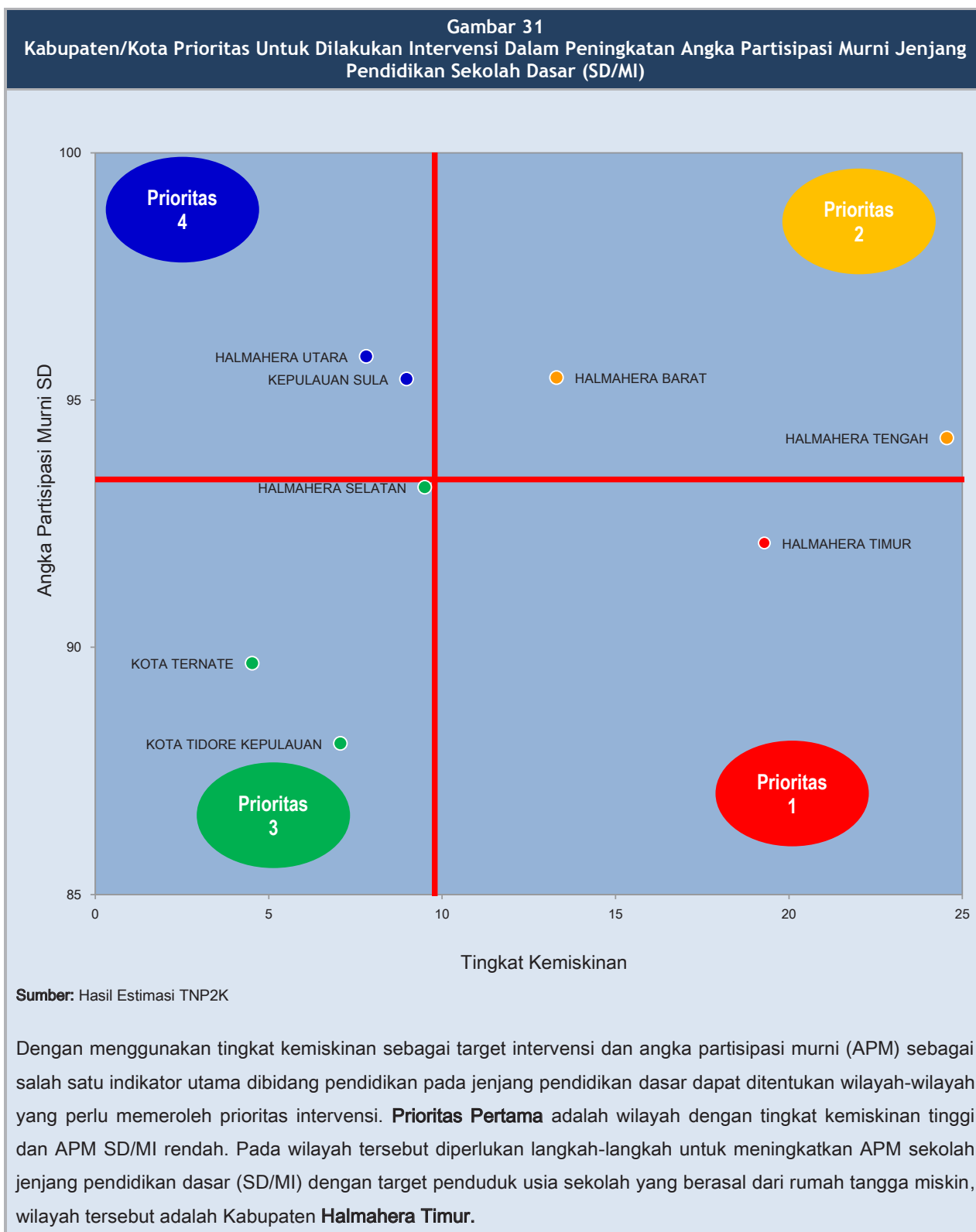
** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak dihitung karena belum terdata secara lengkap.

*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

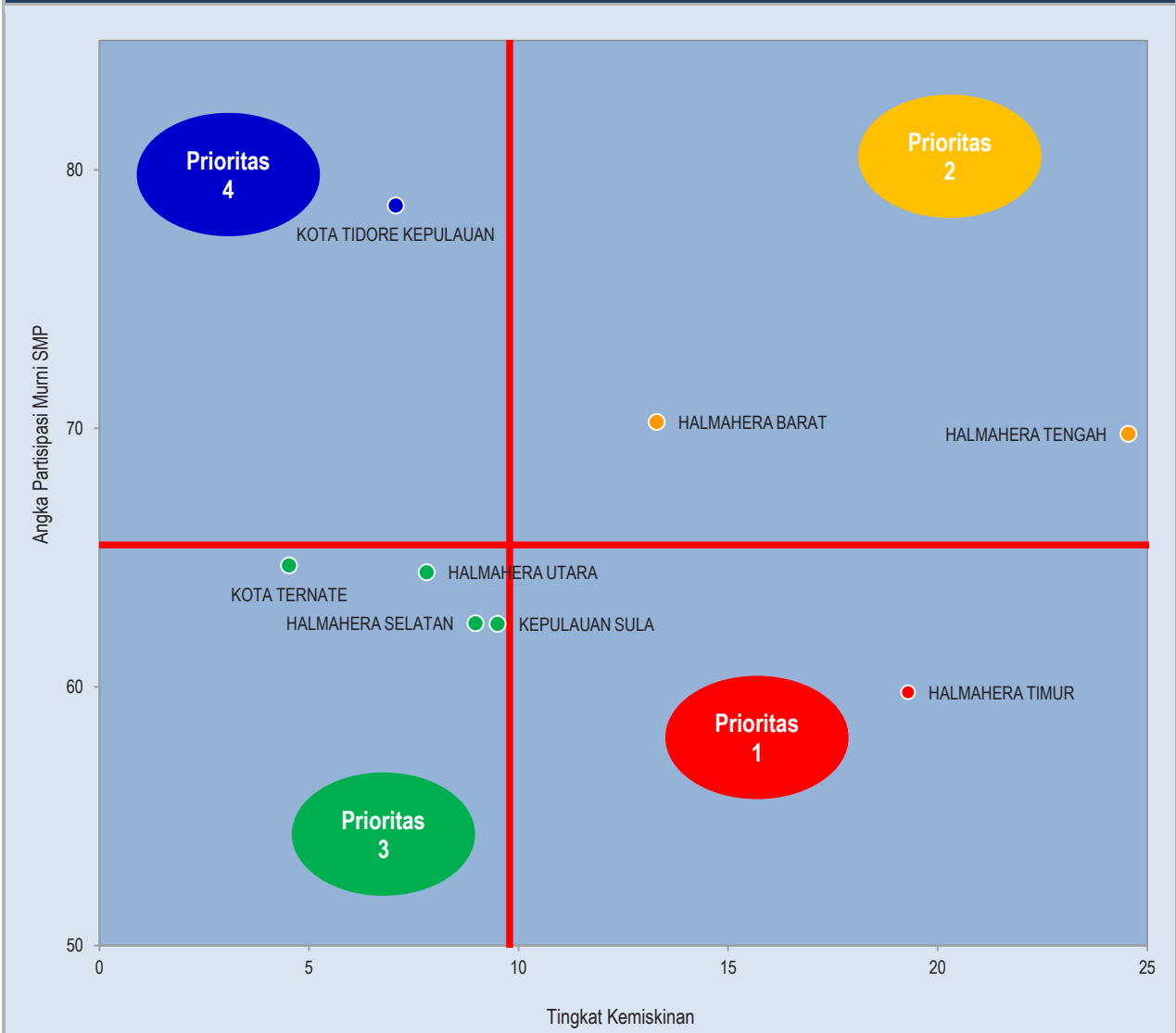


PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

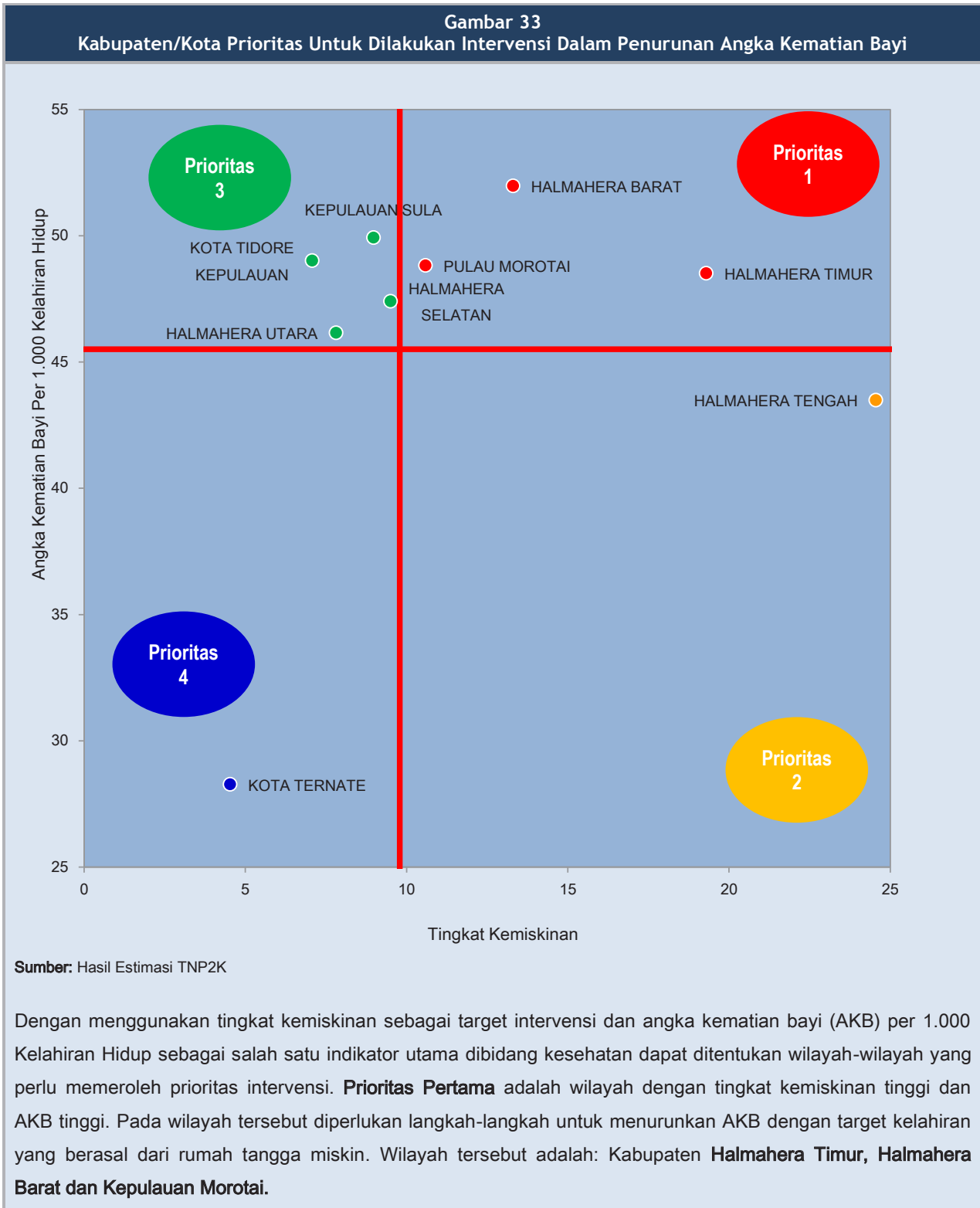
Gambar 32
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama



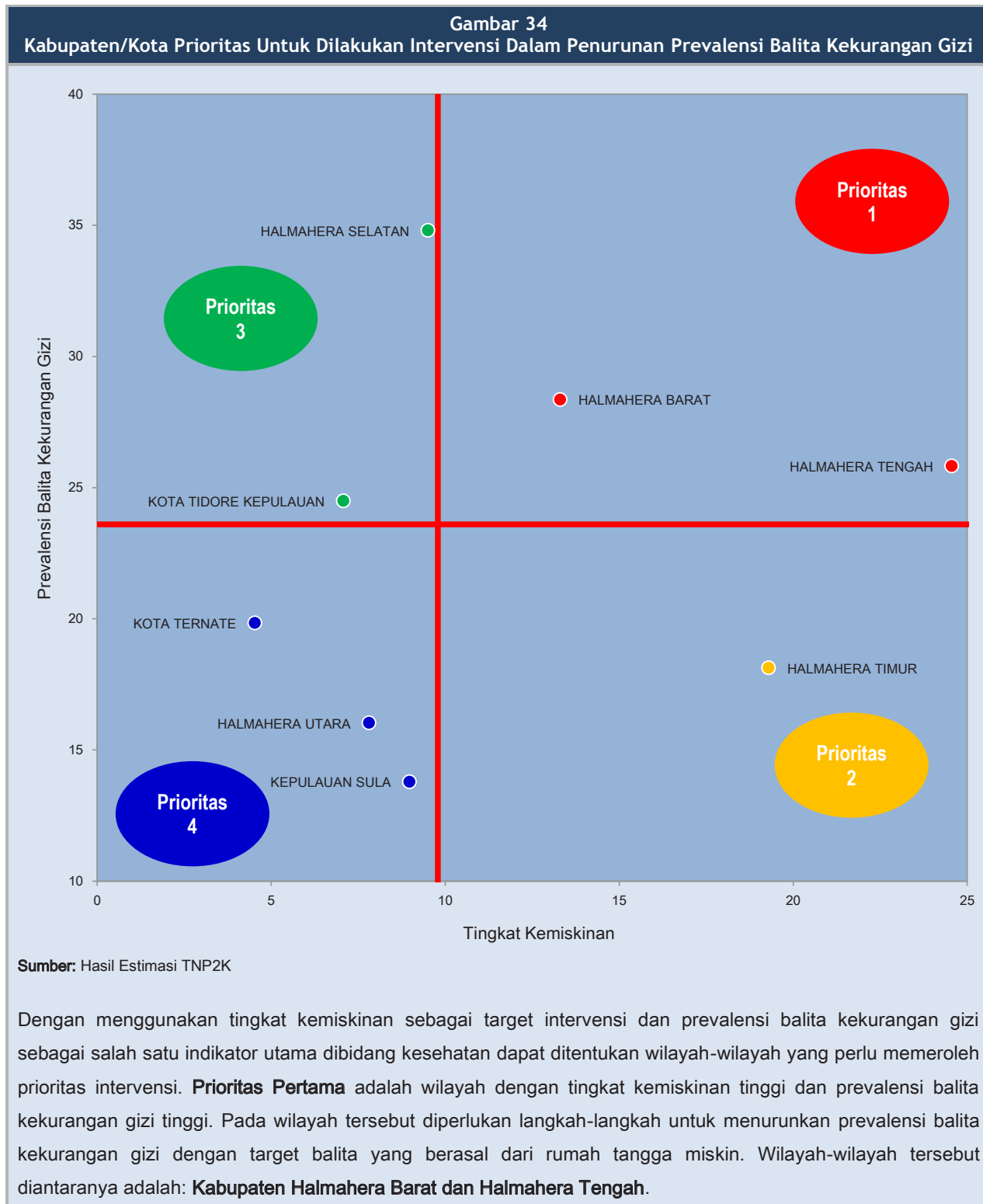
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah Kabupaten **Halmahera Timur**

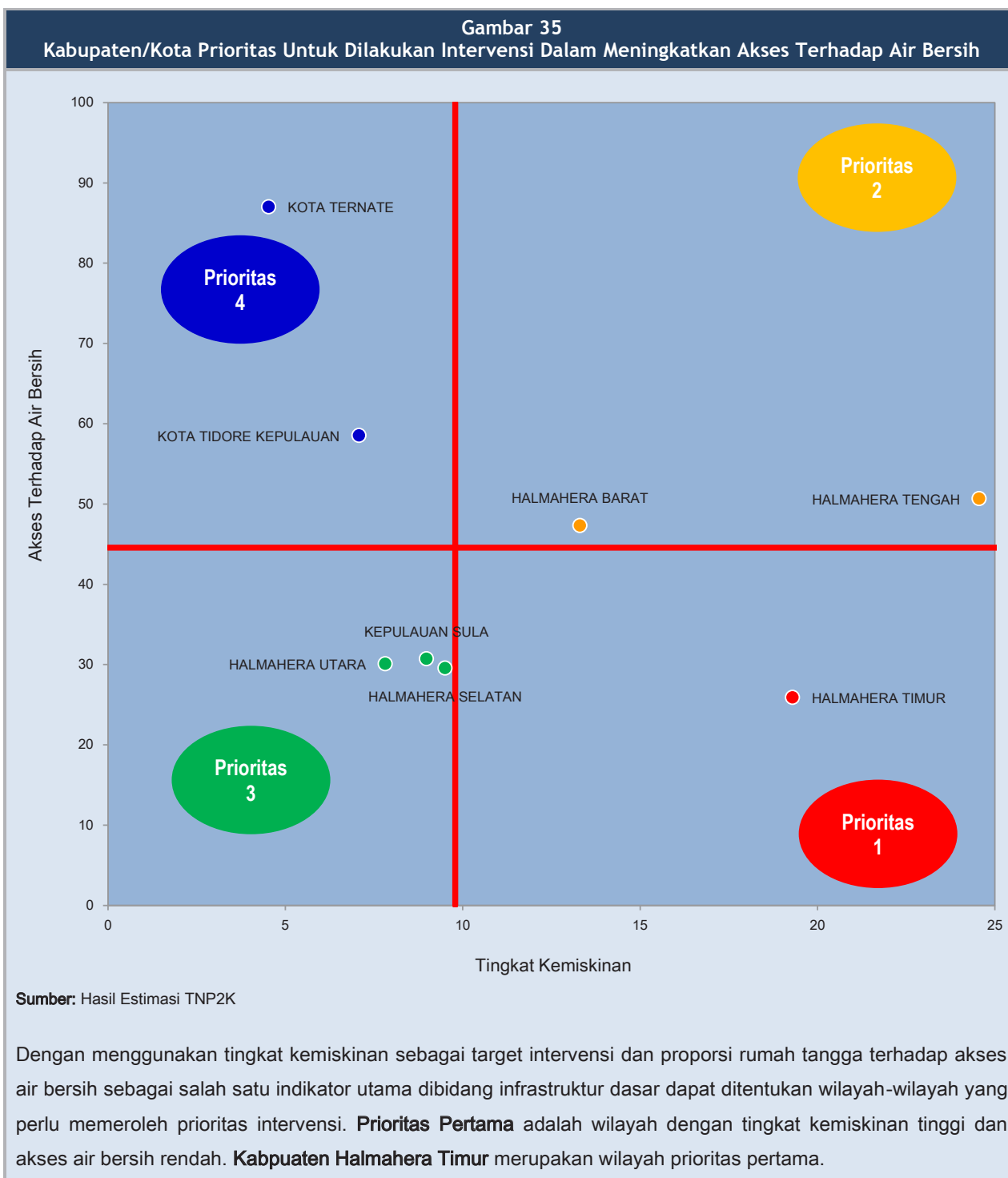
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



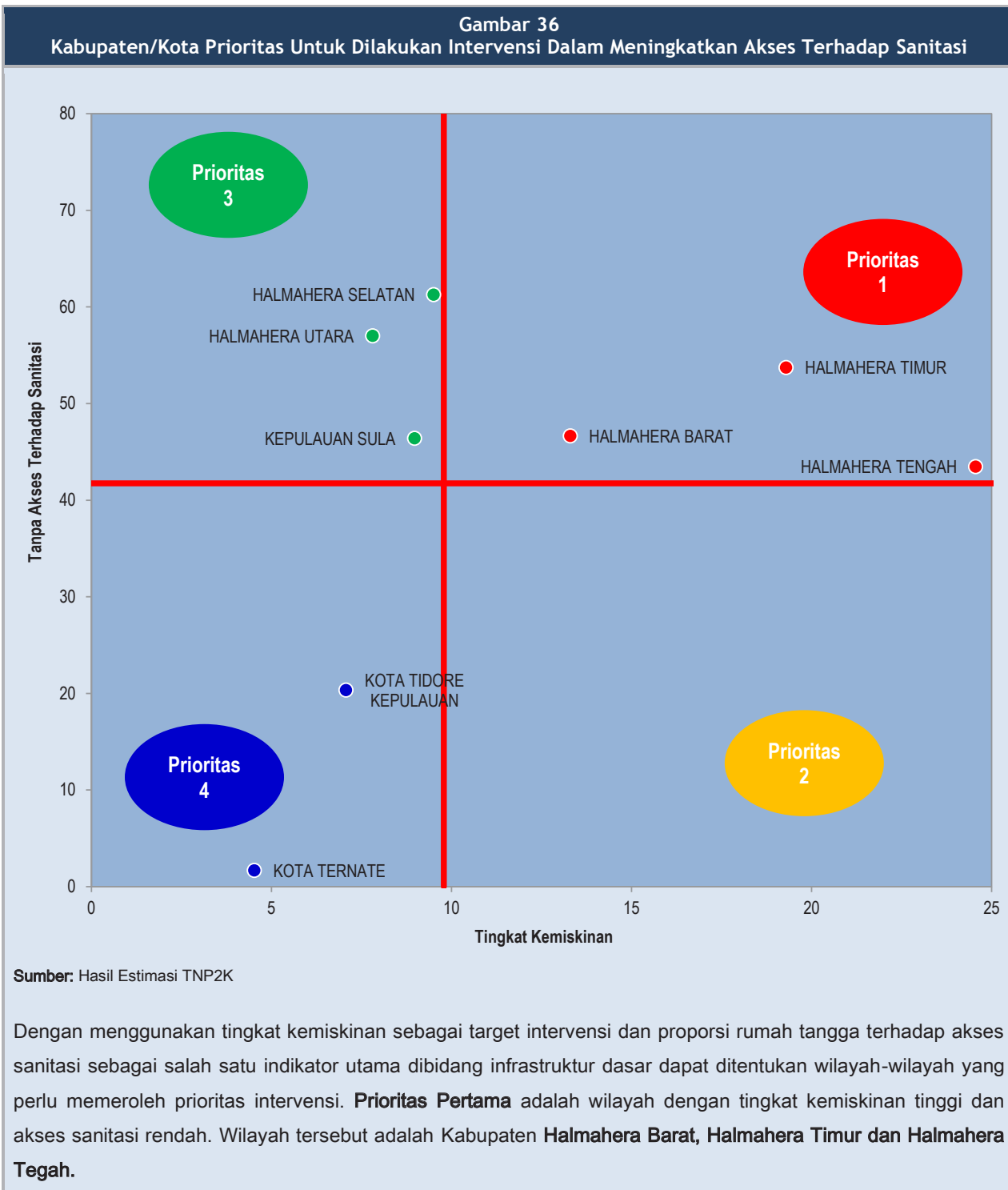
PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



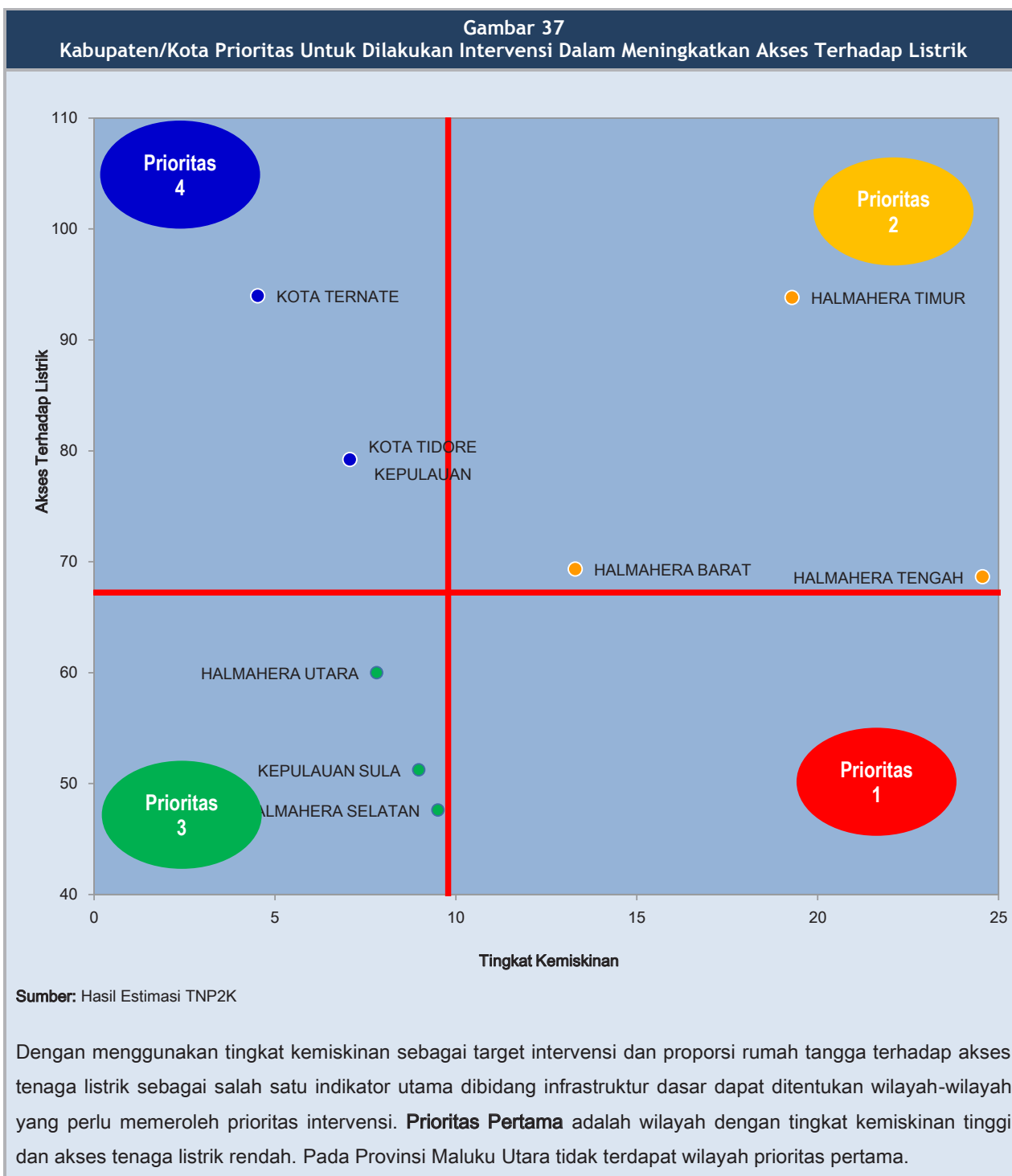
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

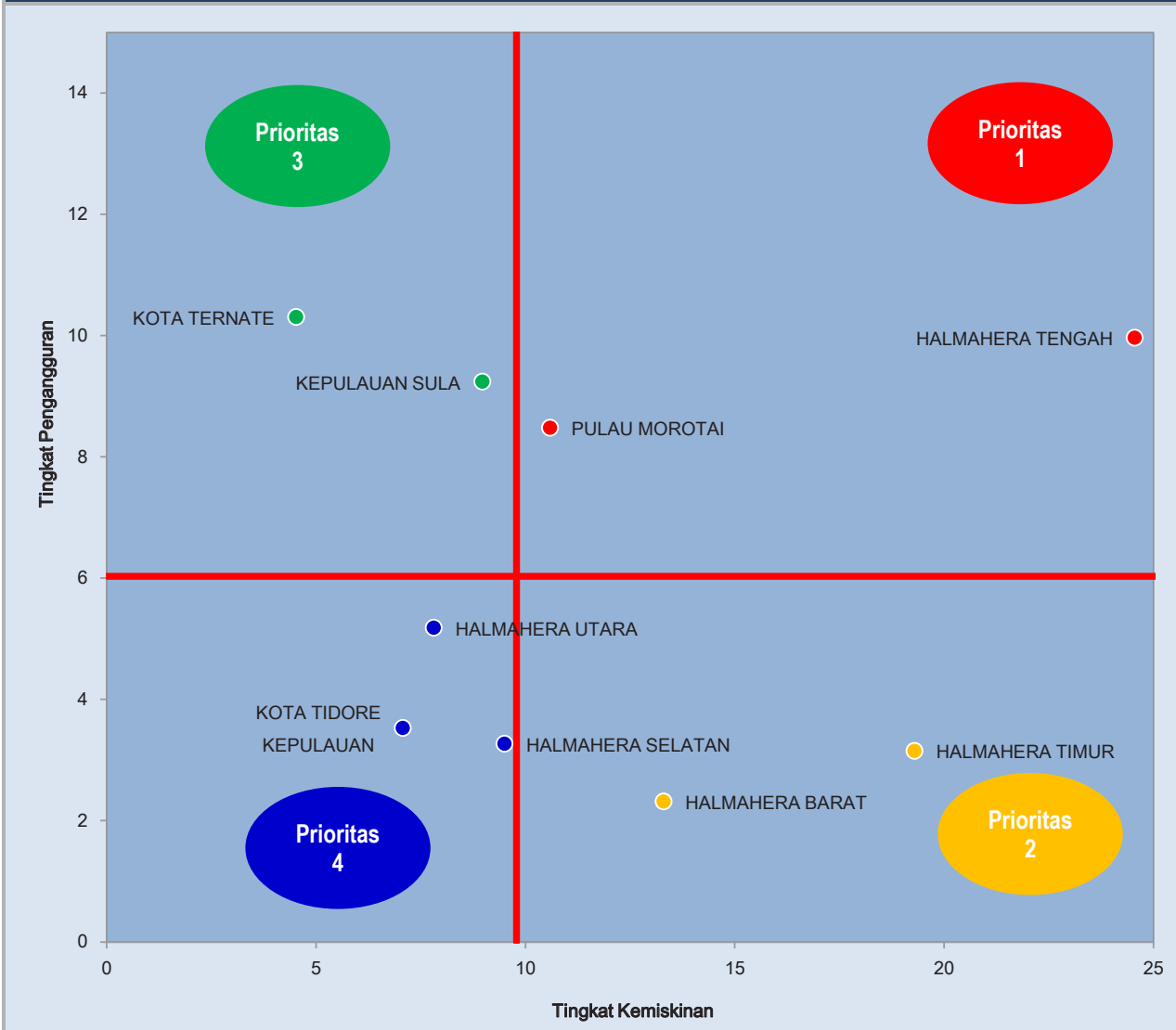


PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Gambar 38
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja



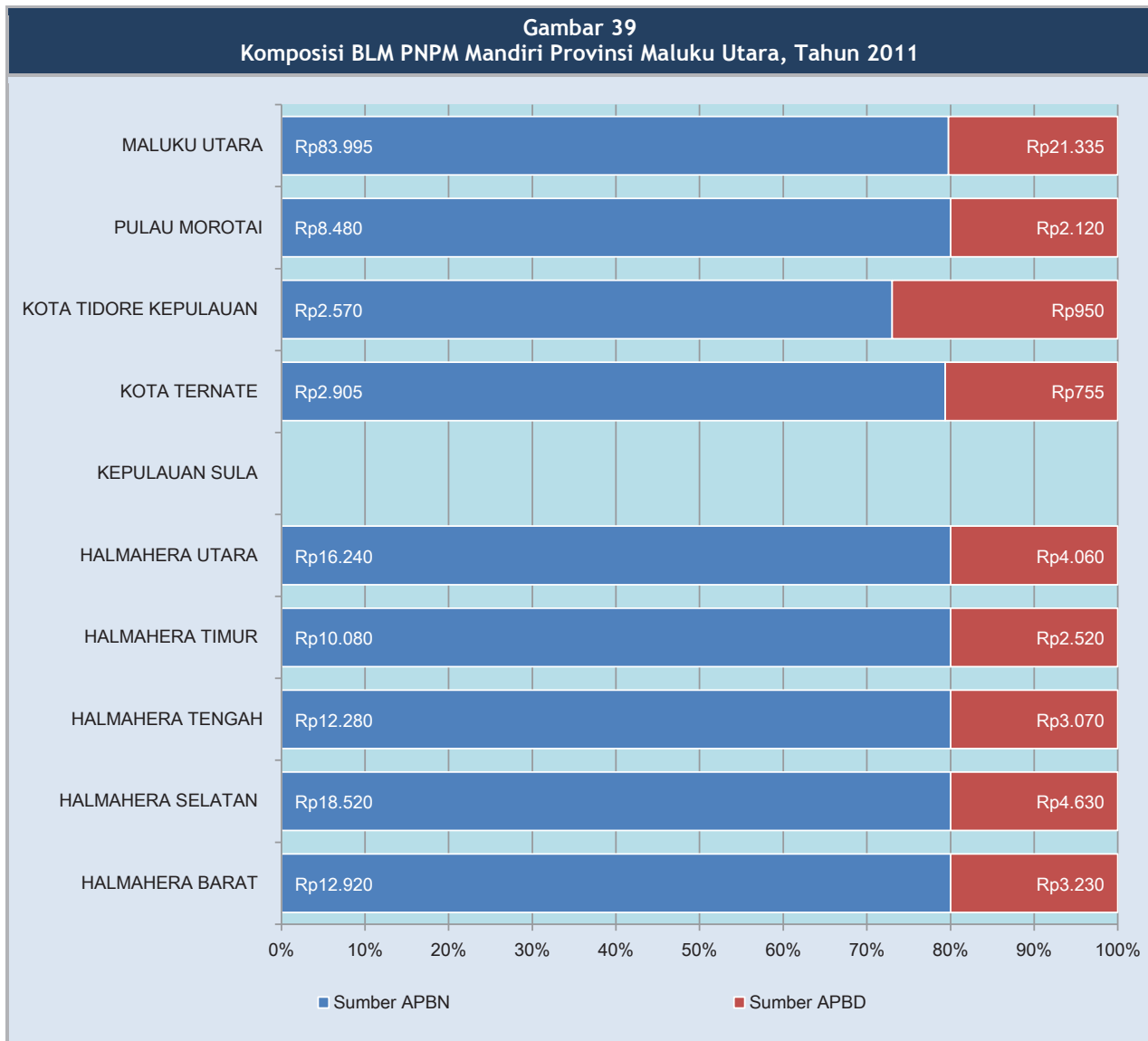
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan tingkat pengangguran sebagai salah satu indikator utama dibidang ketenagakerjaan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat pengangguran tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menciptakan lapangan kerja dan investasi, dengan prioritas pada **Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Mortai**.

BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
PULAU MOROTAI	0	0	0	1	0	0	0	0	1
HALMAHERA TIMUR	2	1	1	1	2	1	1	2	2
HALMAHERA BARAT	1	2	2	1	1	2	1	2	2
HALMAHERA TENGAH	2	2	2	2	1	2	1	2	1
HALMAHERA SELATAN	3	3	3	3	3	3	3	3	4
HALMAHERA UTARA	3	4	3	3	4	3	3	3	4
KEPULAUAN SULA	4	4	3	3	4	3	3	3	3
KOTA TERNATE	3	3	3	4	4	4	4	4	3
KOTA TIDORE KEP.	4	3	4	3	3	4	4	4	4



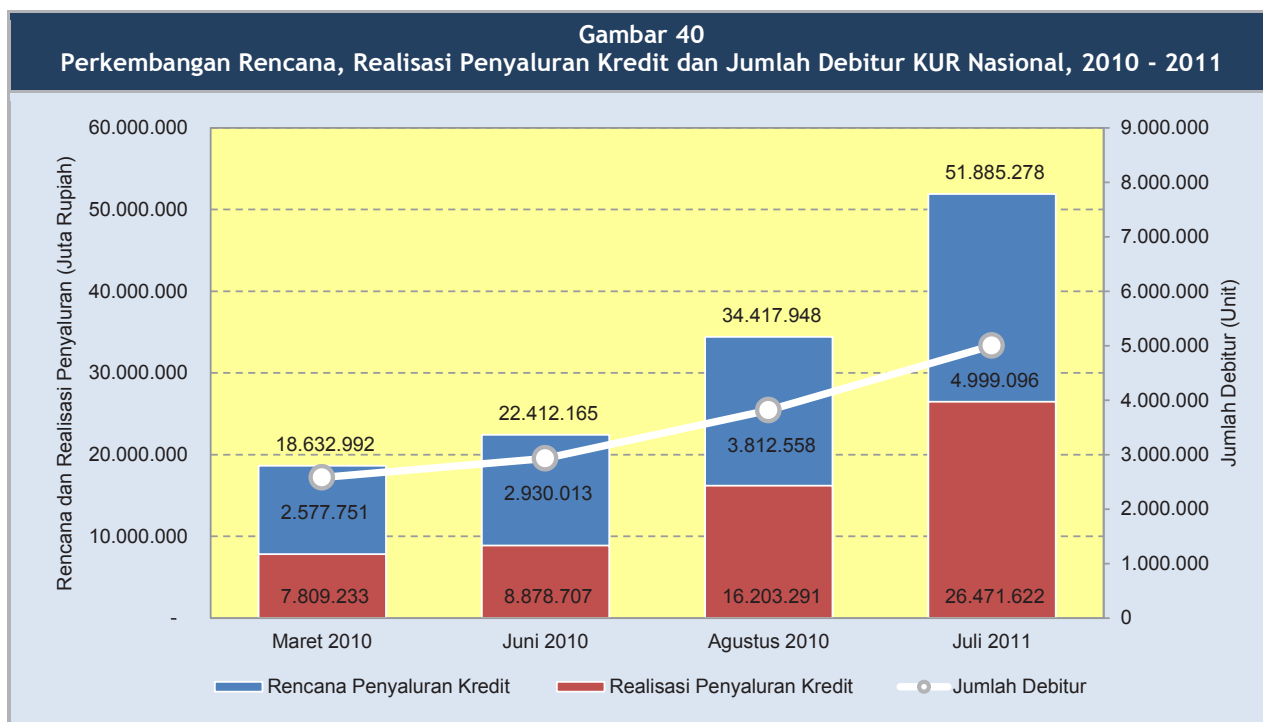
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

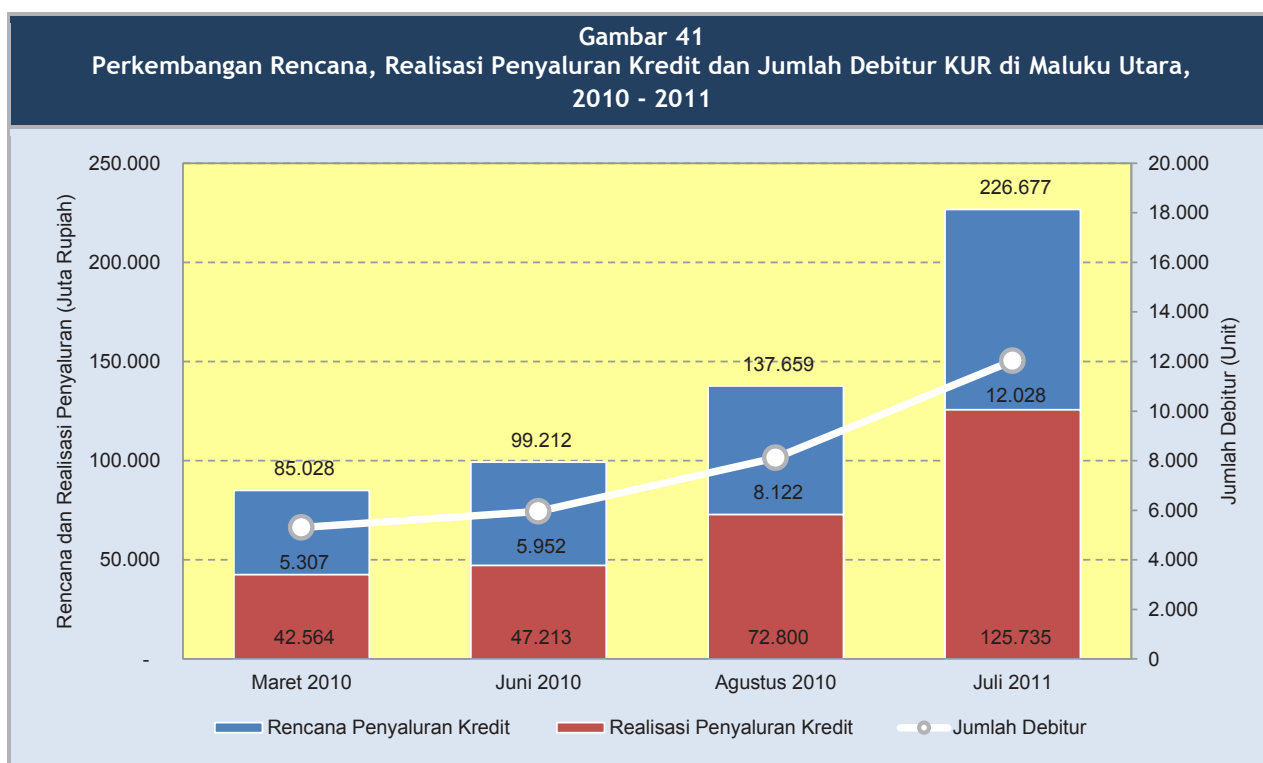
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
HALMAHERA BARAT	16.150		16.150	12.920	3.230	9
HALMAHERA SELATAN	23.150		23.150	18.520	4.630	30
HALMAHERA TENGAH	15.350		15.350	12.280	3.070	8
HALMAHERA TIMUR	12.600		12.600	10.080	2.520	10
HALMAHERA UTARA	20.300		20.300	16.240	4.060	17
KEPULAUAN SULA			0	0	0	0
KOTA TERNATE		3.660	3.660	2.905	755	6
KOTA TIDORE KEPULAUAN		3.520	3.520	2.570	950	8
PULAU MOROTAI	10.600		10.600	8.480	2.120	5
MALUKU UTARA	98.150	7.180	105.330	83.995	21.335	93

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

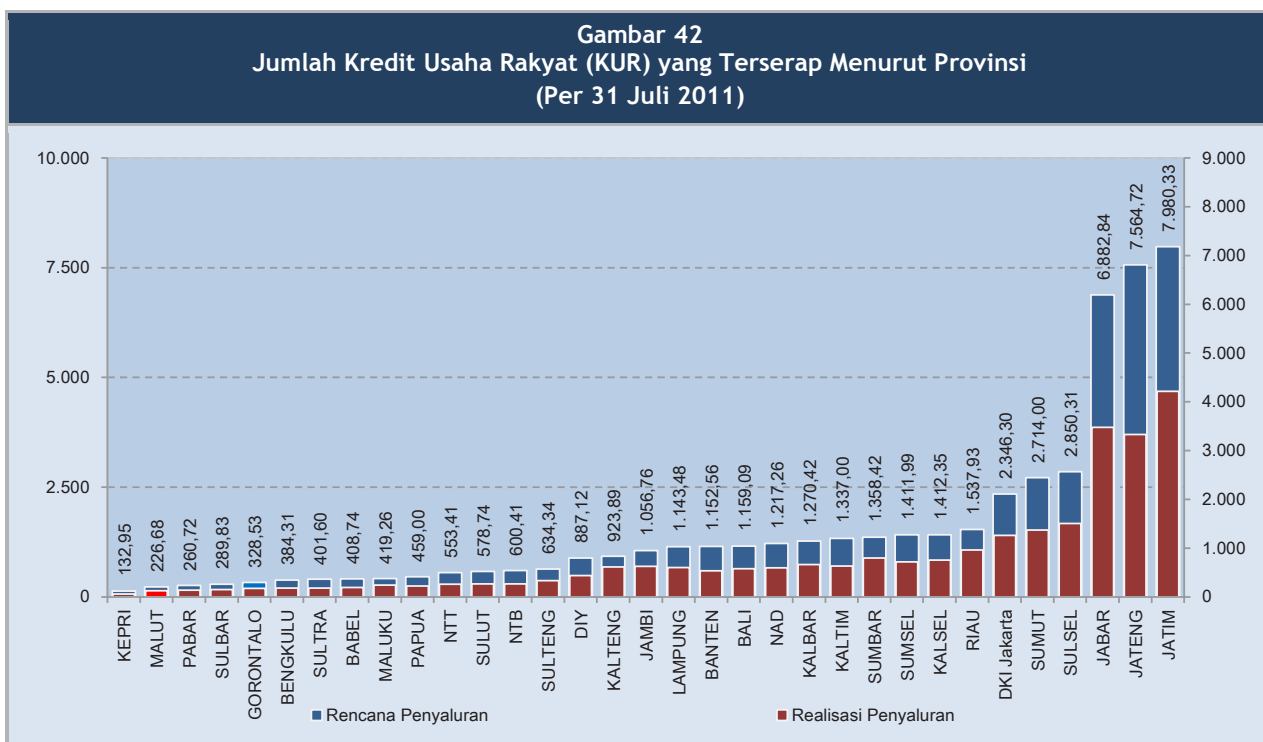


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

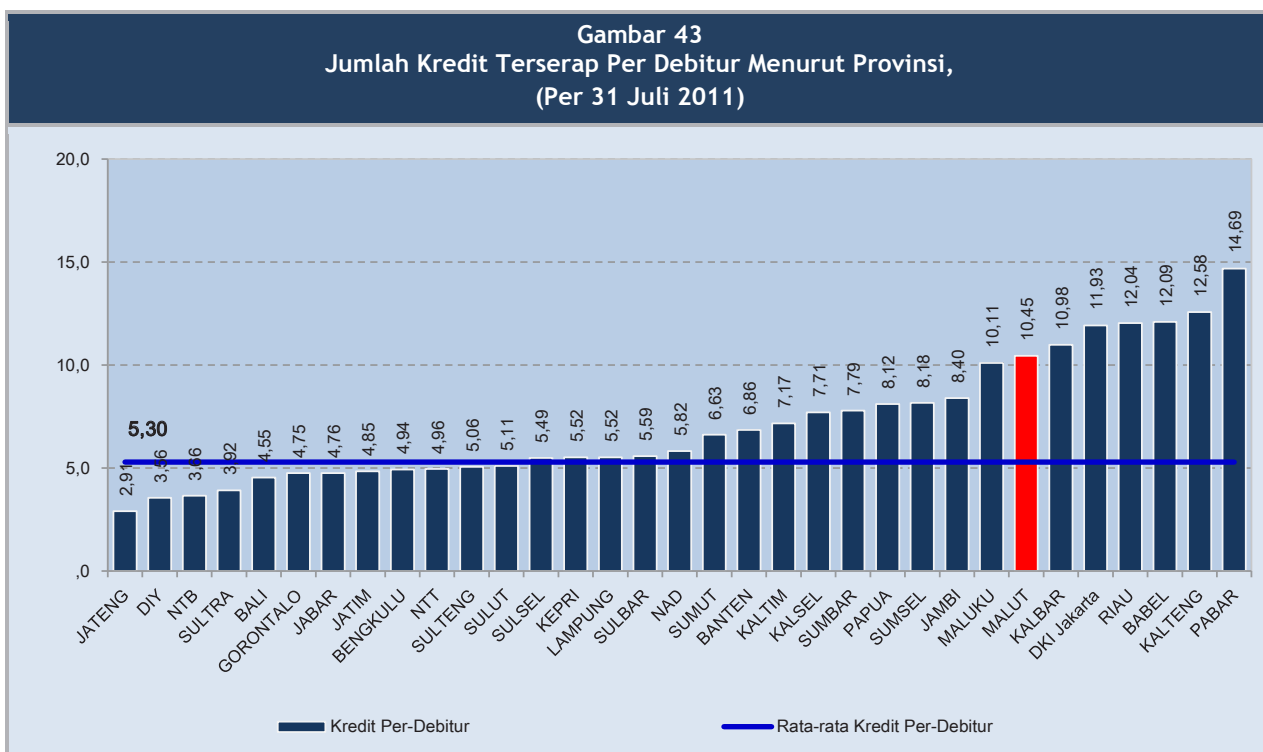


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

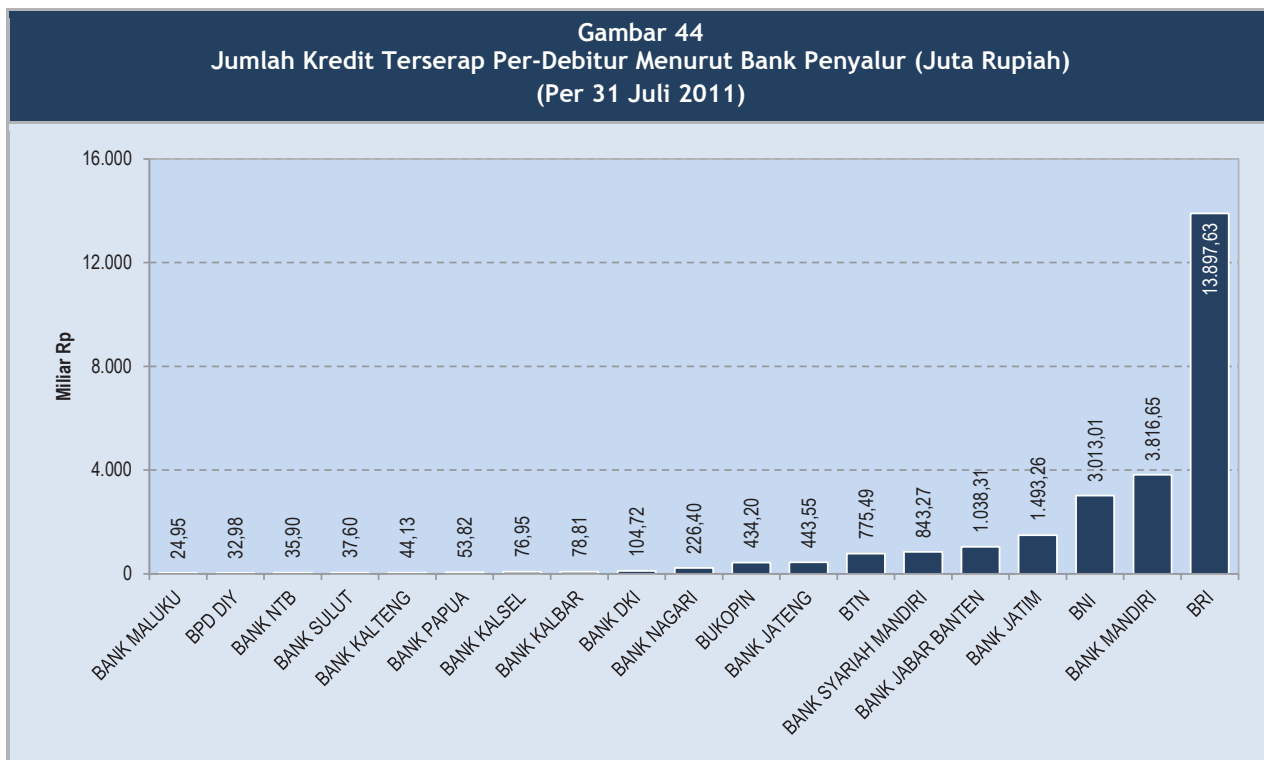


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

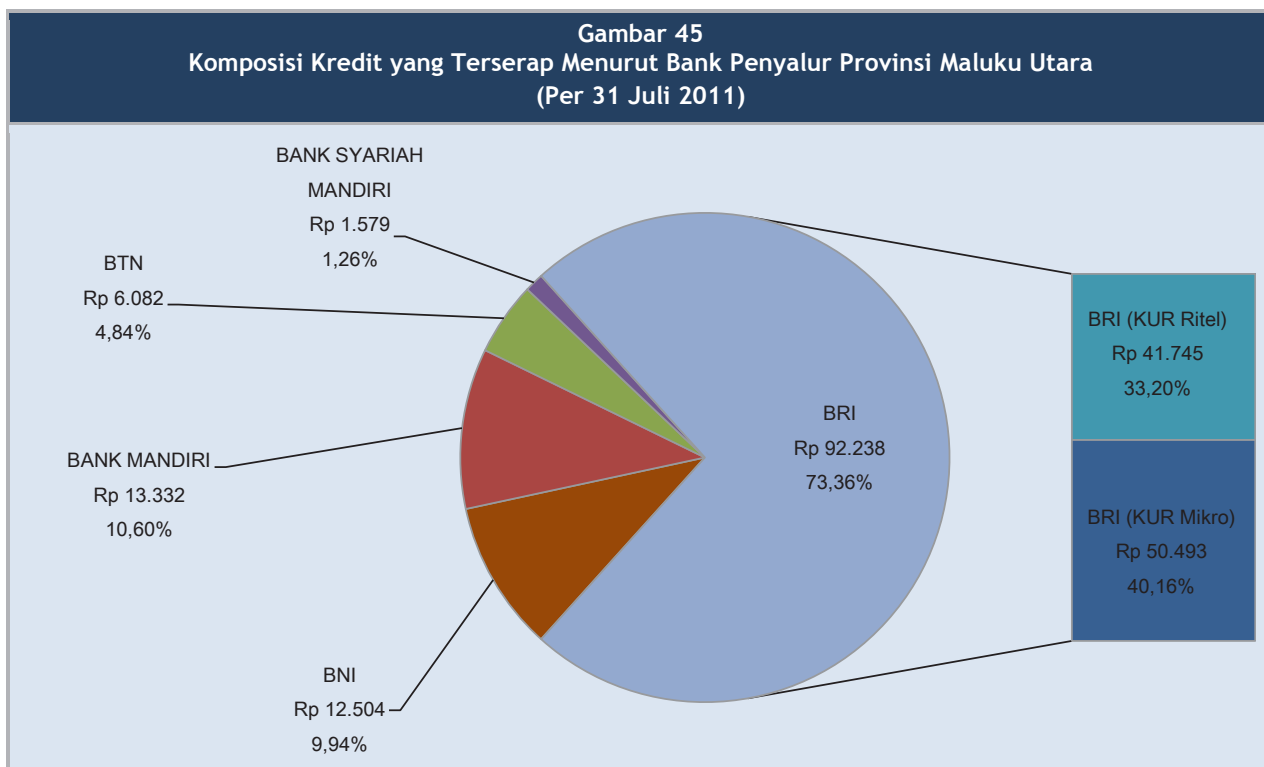


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

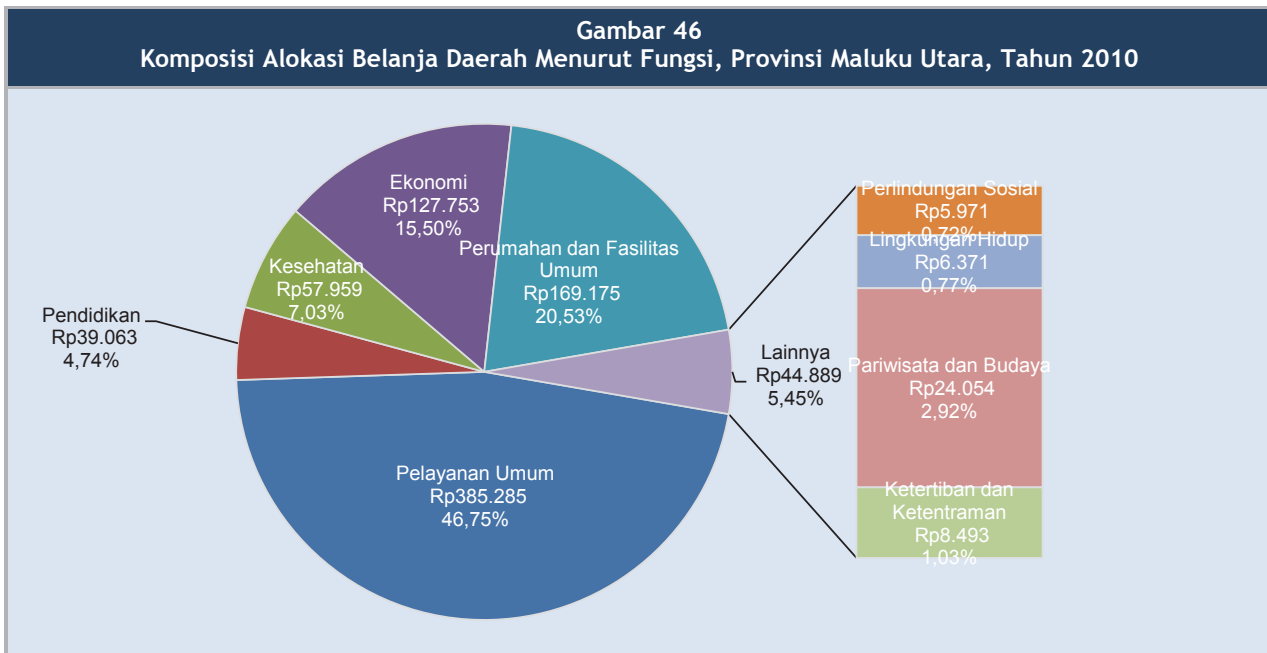


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

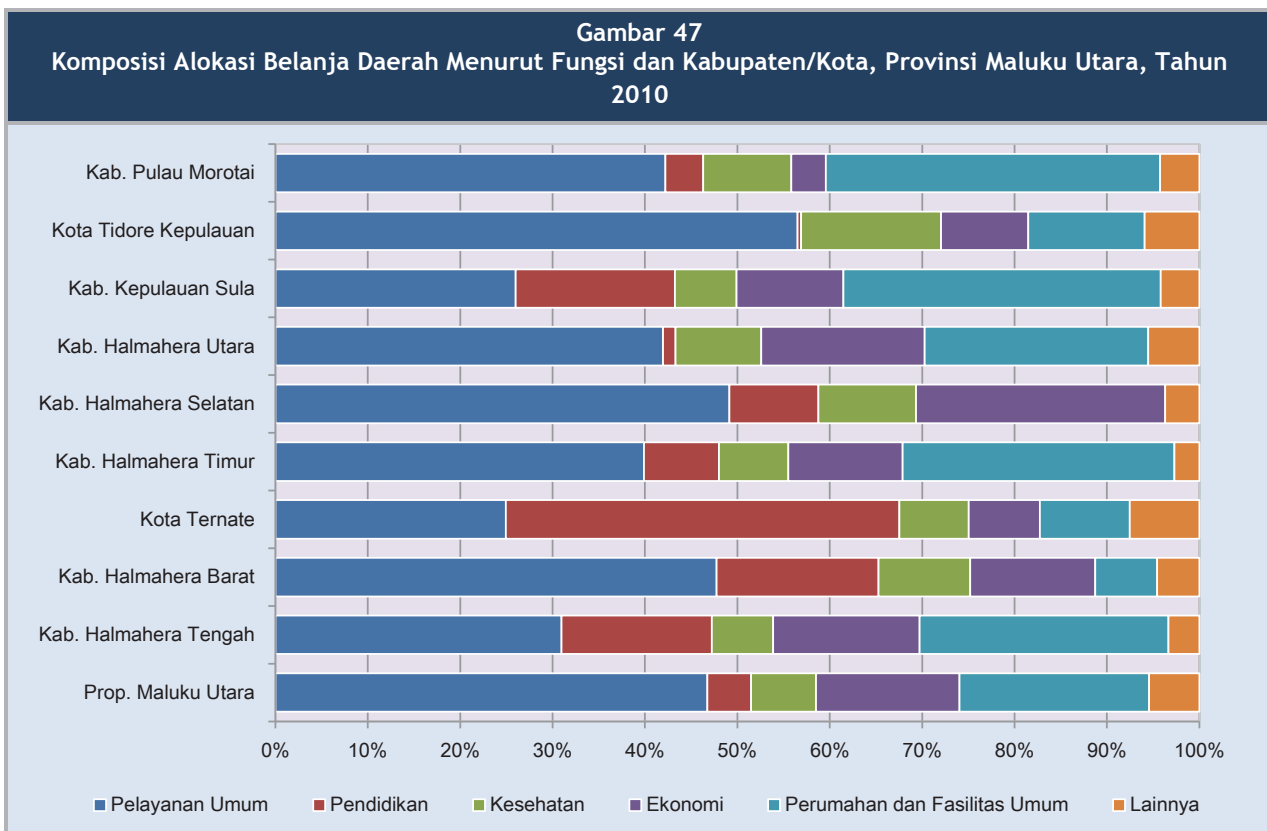


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KEUANGAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010